



ပိတောက်တိုင်းဒေသကြီး

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

သိက္ခာဓာတ်သိက္ခာဓာတ်သိက္ခာဓာတ်သိက္ခာဓာတ်

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

ကမ္ဘာ့သိက္ခာဓာတ်သိက္ခာဓာတ်သိက္ခာဓာတ်သိက္ခာဓာတ်သိက္ခာဓာတ်သိက္ခာဓာတ်သိက္ခာဓာတ်

Jalan Majapahit No.1 Telp. (0361) 431229 - 437162, Fax. (0361)84955716

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
NOMOR 100.3.3/016/DKIS

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PEMERINTAH KOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Kota Denpasar tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
- 4. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;
- 5. Keputusan Walikota Nomor 100.3.3.3/934/HK/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pembentukan Pengelolaan Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 100.3.3/016/DKIS TAHUN 2026 yang tercantum pada lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 15 Juli 2026

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Denpasar,

Ode Wirakusuma Wahyudi, S.Sos
Pembina Tk.I/IV/b
NIP. 197402051999031010

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Walikota Denpasar
- 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
- 3. Inspektur Kota Denpasar
- 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
- 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
- 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
- 7. Arsip

LAMPIRAN I : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI, DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK PEMERINTAH KOTA DENPASAR
TANGGAL : 15 JULI 2026
NOMOR : 100.3.3/016/DKIS
TENTANG : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 100.3.3/016/DKIS

Pada hari Kamis, tanggal 09 bulan Juli tahun 2026 bertempat di daring *zoom meeting* telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
1	Sekretariat DPRD Kota Denpasar	Hasil Rapat yang bersifat rahasia	a. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota	Berpotensi menyebabkan bocornya informasi yang bersifat rahasia dan belum final dapat menimbulkan polemik	Menjaga dan menjamin kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia sehingga dapat menciptakan situasi yang kondusif dalam pembahasan, sebelum disampaikan kepada publik	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
2	Sekretariat DPRD Kota Denpasar	Laporan Keuangan sebelum di audit	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses pemeriksaan laporan keuangan	Dapat melindungi proses pemeriksaan laporan keuangan	Sampai dengan adanya hasil audit yang bersifat final
3	Sekretariat DPRD Kota Denpasar	Konfigurasi database aplikasi, username dan password	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membahayakan keamanan badan publik	Terjaganya keamanan badan publik	Menyesuaikan dengan Pedoman Jadwal Retensi Arsip
4	Sekretariat DPRD Kota Denpasar	Data Pribadi Pegawai Sekretariat DPRD Kota Denpasar dan Anggota DPRD Kota Denpasar	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Dapat melindungi rahasia pribadi	Menyesuaikan dengan Pedoman Jadwal Retensi Arsip
5	Inspektorat Kota Denpasar	Dokumen perencanaan pengawasan (Memuat Dokumen perencanaan pengawasan yaitu PKPT, Konsep Temuan, dll)	a. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 b. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 dan Pasal 26;	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan Data dan Menghambat pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan informasi yang terkandung dalam Dokumen Hasil Pemeriksaan Menyangkut informasi yang dimiliki oleh pihak yang diaudit (auditee), yang memiliki kemungkinan bersifat rahasia. Untuk	Mengamankan agar tidak terjadi pengalihan data dan mengamankan proses pengambilan keputusan dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Tidak Terbatas

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
				membuka informasi tersebut harus seijin pemilik informasi, yaitu Auditee		
6	Inspektorat Kota Denpasar	Dokumen Proses dan Hasil Pengawasan (Memuat dokumen hasil pengawasan seperti LHP, LHA, dll)	a. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 b. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 dan Pasal 26;	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan Data dan Menghambat pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan informasi yang terkandung dalam Dokumen Hasil Pemeriksaan Menyangkut informasi yang dimiliki oleh pihak yang diaudit (auditee), yang memiliki kemungkinan bersifat rahasia. Untuk membuka informasi tersebut harus seijin pemilik informasi, yaitu auditee	Mengamankan agar tidak terjadi pengalagunaan data dan mengamankan proses pengambilan keputusan dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Tidak Terbatas
7	Inspektorat Kota Denpasar	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	a. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 b. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 Tentang	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan Data dan mengungkap rahasia pribadi	Mengamankan agar tidak terjadi pengalagunaan data dan mengamankan proses pengambilan keputusan dalam	Tidak Terbatas

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 dan Pasal 26;		mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	
8	Inspektorat Kota Denpasar	Informasi hasil rapat yang bersifat tertutup	a. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 2 b. UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Tidak Terbatas
9	Inspektorat Kota Denpasar	Biodata Pegawai (Alamat Rumah, Nomor Telepon/HP, Nomor Rekening Pribadi, Hutang, Riwayat Keluarga dan Dokumen bersifat pribadi lainnya)	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan Data dan mengungkap rahasia pribadi	Mengamankan agar tidak terjadi pengalagunaan data	Tidak Terbatas
10	Inspektorat Kota Denpasar	Daftar Akun, Password dan Data Inputan aplikasi/sistem yang digunakan oleh ASN (Memuat email, LHKPN, pajak, sistem kepegawaian dan sistem aplikasi lain-lain)	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan Data dan mengungkap rahasia pribadi	Mengamankan agar tidak terjadi pengalagunaan data	Tidak Terbatas

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
11	Inspektorat Kota Denpasar	Konfigurasi server dan Database Sistem Aplikasi yang ada pada Badan Publik	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 2	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan Data	Mengamankan agar tidak terjadi pengalagunaan data	Tidak Terbatas
12	BPBD Kota Denpasar	Identitas korban kecelakaan lalu lintas, evakuasi pasien, pelayanan antar jenazah gratis dan korban bencana hilang.	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP): Mengklasifikasikan data identitas korban sebagai data pribadi yang bersifat spesifik (termasuk data terkait kesehatan dan data pribadi lainnya), yang pemrosesan dan penyebarluasannya harus dilindungi secara ketat.	Mempercepat pencarian (SAR): Mempublikasikan foto atau ciri-ciri orang hilang sangat krusial agar masyarakat luas dapat membantu identifikasi atau pelaporan.	Melindungi privasi dan trauma: Mencegah korban atau keluarga dari tekanan publik, stigma sosial, dan eksploitasi media.	Informasi yang menyangkut rahasia pribadi seseorang: Dikecualikan selama individu tersebut hidup atau sesuai ketentuan masa simpan yang berlaku.
13	BPBD Kota Denpasar	Rekam medis korban kecelakaan lalu lintas, evakuasi pasien, pelayanan antar jenazah gratis.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP): Pasal 17 huruf h dan i menyatakan bahwa informasi yang berkaitan dengan riwayat pribadi dan kesehatan	Kepentingan Hukum & Peradilan: Dibuka atas perintah hakim (melalui mekanisme <i>Visum et Repertum</i> atau keterangan ahli) guna mengungkap	Pelindungan Hak Privasi: Mencegah kebocoran riwayat penyakit sensitif yang dapat memicu trauma psikologis pasien.	Sesuai Peraturan yang Berlaku: Jangka waktu pengecualian ini merujuk pada batas penyimpanan (retensi) data rekam medis. Menurut <u>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang</u>

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			seseorang termasuk dalam informasi yang dikecualikan.	kebenaran dalam kasus pidana/perdata.		<u>Rekam Medis</u> , data wajib disimpan minimal 25 tahun . Pada fasilitas non-rumah sakit, batas simpan minimum adalah 2 tahun . Selama masa simpan ini, kerahasiaan data dilindungi oleh undang-undang
14	BAPENDA Kota Denpasar	Laporan pajak pajak pribadi	a. UU No 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j b. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. c. Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Mengungkap data pribadi PNS	Melindungi Data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Dibuka apabila : 1. Memenuhi permintaan aparat penegak hukum atas perintah pengadilan 2. Permintaan/ atau persetujuan sendiri 3. Permintaan Institusi/lembaga berwenang
15	BAPENDA Kota Denpasar	Rancangan Peraturan Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan	a. UU No 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf .	Apabila dibuka berpeluang menjadi penyalahgunaan	Membantu badan publik mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Dibuka apabila: 1. Diperuntukkan kepada tim Penyusun Regulasi

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			b. UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. c. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah			2.Setelah disahkan dan ditetapkan menjadi Peraturan
16	BAPENDA Kota Denpasar	Rancangan Keputusan tentang pengelolaan Keuangan dan Pendapatan	a. UU No 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf . b. UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. c. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Apabila dibuka berpeluang menjadi penyalahgunaan	Membantu badan publik mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Dibuka apabila: 1. Diperuntukkan kepada tim Penyusun Regulasi 2.Setelah disahkan dan ditetapkan menjadi Keputusan
17	BAPENDA Kota Denpasar	Dokumen Kelengkapan pertanggung jawaban Belanja	a. UU No 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17. b. UU No 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	Apabila dibuka berpeluang menjadi penyalahgunaan	Membantu badan publik mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Dibuka apabila: 1. Selama masih digunakan/berlaku 2.Terdapat Permintaan tertulis untuk pemeriksaan

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
18	BAPENDA Kota Denpasar	Dokumen transaksi kas masuk bank dan kas keluar di rekening kas daerah	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 b. UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Apabila dibuka berpeluang menjadi penyalahgunaan	Membantu badan publik mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Dibuka apabila : 1. Memenuhi permintaan aparat penegak hukum atas perintah pengadilan 2.Terdapat kerjasama dengan Pihak Terkait
19	BAPENDA Kota Denpasar	Data wajib pajak dan Laporan Penghasilan/omset wajib pajak	a. UU No 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 b. Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang c.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara	Apabila dibuka berpeluang menjadi penyalahgunaan	Melindungi kerahasiaan data wajib pajak	Dibuka apabila: 1. Selama masih digunakan/berlaku 2.Memenuhi permintaan aparat penegak hukum atas perintah pengadilan 3.Terdapat kerjasama dengan Pihak Terkait

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah			
20	BAPENDA Kota Denpasar	Jumlah Tunggakan Wajib Pajak	a. UU No 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 b. Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang	Apabila dibuka berpeluang menjadi penyalahgunaan	Melindungi kerahasiaan data wajib pajak	1. Selama masih digunakan/berlaku. 2. Memenuhi permintaan aparat penegak hukum atas perintah pengadilan 3.Terdapat kerjasama dengan Pihak Terkait 4.Permintaan wajib pajak itu sendiri
21	BAPENDA Kota Denpasar	Berkas Pelayanan yang diajukan wajib pajak	a. UU No 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 b. Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas	Apabila dibuka berpeluang menjadi penyalahgunaan	Melindungi kerahasiaan data wajib pajak	1. Selama masih digunakan/berlaku. 2.Memenuhi permintaan aparat penegak hukum atas perintah pengadilan 3.Terdapat kerjasama dengan Pihak Terkait 4.Permintaan wajib pajak itu sendiri

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang c.UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik			
22	BAPENDA Kota Denpasar	Sistem Manajemen Database	a. UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 b. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j	Dapat mengganggu keamanan jaringan komputer	Menjaga keamanan jaringan komputer	Selama masih digunakan/berlaku
23	BAPENDA Kota Denpasar	Data Pribadi Pegawai	UU No 14 Th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf H	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Dibuka apabila : 1. Pihak yang memiliki hak atas kerahasiaan informasi tersebut memberikan persetujuan 2. Memenuhi permintaan aparat penegak hukum atas perintah pengadilan
24	Badan Pengelola Keuangan dan	SIMDA	a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang	Dapat membahayakan Data Aset Pemerintah berkaitan dengan	Melindungi keamanan data asset pemerintah (Pemeriksaan BPK)	Selama masih digunakan

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
	Aset Daerah Kota Denpasar		Pengelolaan Keuangan Daerah; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	neraca Pemerintah Kota		
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Unaudited	a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); c. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran	Mengakibatkan kerancuan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Menjaga stabilitas pertanggungjawaban yang akuntabel	Setelah mendapatkan opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			Daerah Kota Denpasar Nomor 1); d. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;			
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar	Data Pribadi Pegawai	a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf H b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik Pasal 26 c. UU No 24 Th 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan
27	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar	Username dan Password Admin Aplikasi dan Media Sosial	a.Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6 ;	Penyalahgunaan Hak Akses oleh Pihak Tertentu	Menjaga/melindungi Hak Akses	Selama Masih Aktif dan Dibutuhkan

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			b.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25;			
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar	Rincian Data Gaji, Piutang dan Tunjangan Pegawai	a.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; b.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas, Kecuali sampai ada Izin dari Pribadi yang Bersangkutan
29	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar	Memo/Catatan Internal dan Disposisi Surat Pimpinan	a.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; b.Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf I dan j;	Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Tidak Terbatas
30	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar	Data Pribadi Pelapor pada Aplikasi Pengaduan (SP4N Lapor! Dan Pro Denpasar)	a.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Penyalahgunaan Identitas oleh Pihak Tertentu	Melindungi Identitas Pribadi dari Penyalahgunaan Identitas	Tidak Terbatas, Kecuali sampai ada Ijin dari Pribadi yang Bersangkutan

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
31	Badan Riset Daerah Kota Denpasar	Seluruh data, surat-surat, laporan, penelitian, telaahan, kajian, naskah dinas, berita acara, konsep keputusan, dokumen administrasi, serta dokumen lainnya yang masih dalam proses penyusunan, pembahasan, verifikasi, validasi, evaluasi, atau belum dikuasai dan belum didokumentasikan	a. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i b. UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Menimbulkan dampak negatif akibat penyebaran informasi yang belum akurat	Mencegah terjadinya penyalahgunaan serta kesalahpahaman informasi	Sampai dokumen ditetapkan, dikuasai, didokumentasikan, atau dipublikasikan secara resmi oleh BRIDA Kota Denpasar.
32	Badan Riset Daerah Kota Denpasar	Data Pribadi Pegawai, meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), alamat, tempat dan tanggal lahir, nomor telepon alamat email pribadi, data keluarga, riwayat kesehatan, rekening	-UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h -UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 -UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang bersangkutan

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
		bank, Laporan Pajak Pribadi (LP2P), dokumen kepegawaian yang memuat data pribadi, serta data pribadi lainnya yang dilindungi peraturan perundang-undangan				
33	Badan Riset Daerah Kota Denpasar	Informasi keamanan sistem elektronik, meliputi <i>User ID</i> dan <i>Password</i> aplikasi, <i>Private IP Address</i> , <i>Bandwidth Management</i> , konfigurasi jaringan, hak akses sistem, kredensial akun, serta informasi teknis lainnya yang berkaitan dengan keamanan sistem informasi dan jaringan di lingkungan BRIDA Kota Denpasar	-UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b dan huruf j -UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2024, -Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik	Rentan akan peretasan pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga penyalahgunaan hak akses	Menjaga/melindungi hak akses	Selama sistem, jaringan, atau informasi keamanan tersebut masih digunakan

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
34	Badan Riset Daerah Kota Denpasar	Dokumen pengelolaan keuangan yang masih dalam proses, meliputi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Rencana Anggaran Kas (RAK), dokumen pendukung penyusunan anggaran, serta dokumen keuangan lainnya yang masih dalam tahap penyusunan, pembahasan, verifikasi, atau pemeriksaan/audit.	-UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i -UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara -Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Menimbulkan kesalahpahaman karena dokumen masih bersifat rancangan atau belum final dan memengaruhi proses pembahasan dan pengambilan keputusan terkait anggaran.	Mencegah terjadinya kesalahpahaman	Sampai dokumen ditetapkan secara resmi atau proses pemeriksaan/audit selesai
35	Badan Riset Daerah Kota Denpasar	Proses penelitian (data/dokumen, foto, video)	UU No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b dan h	Dapat menyebabkan penyalahgunaan data, duplikasi atau plagiat serta tersebarnya informasi yang belum akurat dan teruji	Mencegah terjadinya penyalahgunaan serta kesalahpahaman informasi	Dibuka sampai dengan laporan penelitian/buku/jurnal diterbitkan

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
36	Badan Riset Daerah Kota Denpasar	Data pribadi responden wawancara penelitian	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b dan h	Dapat mengganggu keamanan, kenyamanan dan privasi responden/informan serta dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Kepentingan pribadi dan hak asasi responden/informan dapat terlindungi	Dibuka apabila diijinkan oleh responden
37	Badan Riset Daerah Kota Denpasar	Proses penilaian penjurian pada Lomba Kompetisi Inovasi Perangkat Daerah dan Kompetisi Inovasi Masyarakat	a. UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j	Dapat mengganggu hak penilaian dan keputusan pada juri	Melindungi hak penilaian dan keputusan pada juri	Sampai hasil penilaian dan penetapan pemenang diumumkan secara resmi oleh BRIDA Kota Denpasar
38	Badan Riset Daerah Kota Denpasar	Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	-UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b -UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta -UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten -UU Nomor 65 Tahun 2024 tentang Merek dan Indikasi Geografis	Mengganggu perlindungan HKI	Melindungi hak kekayaan intelektual	Sampai sertifikat HKI diterbitkan atau sampai informasi tersebut diumumkan secara resmi oleh pemegang hak

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
39	BAPPEDA Kota Denpasar	Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)	a. Pasal 17 huruf h angka 1, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem (OPPKPKE) c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)	Memuat data pribadi (<i>by name by address</i>) yang bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu apabila aksesnya dibuka	Data hanya dapat diakses oleh Pihak Tertentu yang memohonkan data dan disepakati melalui Berita Acara Serah Terima (BAST)	Selama jangka waktu yang dibutuhkan
40	BAPPEDA Kota Denpasar	Keluarga Risiko Stunting (KRS)	a. Pasal 17 huruf h angka 1 UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Percepatan Penurunan Stunting	Memuat data pribadi (<i>by name by address</i>) yang bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu apabila aksesnya dibuka	Data hanya dapat diakses oleh Pihak Tertentu yang memohonkan data dan disepakati melalui Berita Acara Serah Terima (BAST)	Selama jangka waktu yang dibutuhkan
41	BAPPEDA Kota Denpasar	Informasi Hak Akses pengguna system	Pasal 17 huruf c angka 6 UU No.14 Tahun 2008 Informasi Publik	Dapat mengungkapkan data rahasia berupa hak akses pengguna	Menjaga rahasia data hak akses pengguna	Selama jangka waktu yang dibutuhkan

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
		informasi data srever		system informasi data server	sistem informasi data sever	
42	BAPPEDA Kota Denpasar	Informasi pada dokumen form DK (Data Keluarga) pegawai	Pasal 17 huruf h angka 1 UU No.14 Tahun 2008 Informasi Publik	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang yaitu riwayat dan kondisi keluarga	Menjaga rahasia pribadi seseorang yaitu riwayat dan kondisi keluarga	Selama jangka waktu yang dibutuhkan
43	BAPPEDA Kota Denpasar	Informasi atau dokumen cuti sakit pegawai	Pasal 17 huruf h angka 2 UU No.14 Tahun 2008 Informasi Publik	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang yaitu riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang yaitu riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang	Selama jangka waktu yang dibutuhkan
44	BAPPEDA Kota Denpasar	Informasi atau dokumen pribadi pegawai yang terkait dengan keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No.14 Tahun 2008 Informasi Publik	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang yaitu keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang yang disalahgunakan	Menjaga rahasia pribadi seseorang yaitu keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang	Selama jangka waktu yang dibutuhkan
45	BAPPEDA Kota Denpasar	Daftar Akun ,Password dan data inputan aplikasi/sistem yang digunakan oleh ASN (Memuat	UU No.14 Tahun 2008 Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 1,3 dan 5	Berpotensi terjadi penyalahgunaan data dan mengungkap rahasia pribadi	Mengamankan agar tidak terjadi penyalahgunaan data	Selama jangka waktu yang dibutuhkan

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
		email,LHKPN,pajak, sistem kepegawaian dan sistem aplikasi lainnya				
46	BAPPEDA Kota Denpasar	Dokumen Rancangan Kegiatan dan Anggaran yang belum disahkan	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Dapat menghambat proses penyusunan dan menghindari kesalahan persepi karena masih dalam proses pembahasan	Dapat memperlancar proses penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran	Selama dokumen disahkan
47	BKPSDM Kota Denpasar	Proses Tindak Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik	Merupakan dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses tindak disiplin. Dasar hukum: a. Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17) b. Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (pasal 57)	1.Mengganggu proses bisnis/ proses penjatuhan hukuman tindak disiplin 2. Penyalahgunaan data 3. Efek sosial yang berujung pada justifikasi publik terhadap pegawai ASN yang melanggar 4.Menimbulkan Stigma dan diskriminasi 5.Berpotensi mengganggu proses pembinaan kepegawaian	Proses pengambilan tindak disiplin dapat berjalan dengan lancar dan netral	25 tahun

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
48	BKPSDM Kota Denpasar	SK Penjatuhan Tindak Disiplin	Hanya dapat dibuka untuk pemeriksaan pengadilan dan termasuk kepada rahasia jabatan Dasar hukum: a. Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17) b. Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (pasal 57)	1.Penyalahgunaan data 2. Efek sosial yang berujung pada justifikasi publik terhadap Pegawai ASN yang melanggar 3.Menimbulkan stigma dan diskriminasi terhadap pegawai yang bersangkutan 4.Berpotensi mengganggu proses pembinaan kepegawaian	Proses pengambilan tindak disiplin dapat berjalan dengan lancar dan netral	25 tahun
49	BKPSDM Kota Denpasar	SK Perceraian	Hanya dapat dibuka untuk pemeriksaan pengadilan dan termasuk kepada rahasia jabatan: Dasar Hukum a. Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17)	memuat data pribadi dan informasi yang bersifat rahasia yang berkaitan dengan kehidupan pribadi pegawai. Pembukaan informasi berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas privasi yang bersangkutan, penyalahgunaan data	Terjaminnya kerahasiaan atas data pribadi seseorang	

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
				pribadi, stigma masyarakat, serta dapat mengganggu kehidupan pribadi		
50	BKPSDM Kota Denpasar	SK Penjatuhan Pelanggaran Kode Etik Sanksi Moral Secara Tertutup	Hanya dapat dibuka untuk pemeriksaan pengadilan dan termasuk kepada rahasia jabatan Dasar hukum: a. Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17) b. Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (pasal 57)	dapat mengganggu proses pembinaan dan penegakan kode etik, serta berpotensi menghambat terciptanya proses pemeriksaan yang objektif dan independen	Proses pengambilan keputusan terhadap kode etik dapat berjalan dengan lancar dan netral	
51	BKPSDM Kota Denpasar	Dokumen hasil uji pemetaan ASN	Merupakan rahasia negeri yang digunakan dalam proses seleksi / promosi / mutasi Dasar hukum: Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17)	Merupakan rahasia negara yang apabila dibuka dapat mengganggu proses bisnis/proses seleksi / promosi / mutasi	Proses seleksi / promosi ASN berjalan dengan lancar dan netral	25 Tahun

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
52	BKPSDM Kota Denpasar	Data Pribadi Pegawai Berupa: Nomor Telepon, Alamat Rumah, NIK, data keluarga, Tanggal kelahiran, Nomor KK)	a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf H b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26	1. Menjaga data pribadi agar tidak jatuh pada pihak yang tidak Bertanggungjawab 2. Merupakan privasi seseorang untuk menghindari Tindakan yang tidak diinginkan	Terjaminnya kerahasiaan atas data pribadi seseorang	25 tahun
53	BKPSDM Kota Denpasar	SK Pelantikan Jabatan	Hanya dapat diungkapkan pada ASN yang bersangkutan dan ASN lainnya untuk keperluan administrasi kepegawaian. Dasar Hukum: a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf H b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26	1. Menjaga data pribadi agar tidak jatuh pada pihak yang tidak bertanggungjawab (karena bernilai uang) 2. Merupakan privasi seseorang untuk menghindari Tindakan yang tidak diinginkan	Terjaminnya kerahasiaan atas data pribadi seseorang	25 tahun
54	BKPSDM Kota Denpasar	SK Pelantikan Jabatan	Hanya dapat diungkapkan pada ASN yang bersangkutan dan ASN lainnya untuk keperluan administrasi kepegawaian. Dasar Hukum:	1. Menjaga data pribadi agar tidak jatuh pada pihak yang tidak bertanggungjawab (karena bernilai uang)	Terjaminnya kerahasiaan atas data pribadi seseorang	26 tahun

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf H b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26	2. Merupakan privasi seseorang untuk menghindari Tindakan yang tidak diinginkan		
55	BKPSDM Kota Denpasar	Sk Kenaikan Gaji Berkala Pimpinan	Hanya dapat diungkapkan pada ASN yang bersangkutan dan ASN lainnya untuk keperluan administrasi kepegawaian. Dasar Hukum: a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf H b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26	1. Menjaga data pribadi agar tidak jatuh pada pihak yang tidak bertanggungjawab (karena bernilai uang) 2. Merupakan privasi seseorang untuk menghindari Tindakan yang tidak diinginkan	Terjaminnya kerahasiaan atas data pribadi seseorang	25 tahun
56	BKPSDM Kota Denpasar	Sk Pensiun	Hanya dapat diungkapkan pada ASN yang bersangkutan dan ASN lainnya untuk keperluan administrasi kepegawaian. Dasar Hukum: a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf H	1. Menjaga data pribadi agar tidak jatuh pada pihak yang tidak bertanggungjawab (karena bernilai uang) 2. Merupakan privasi seseorang untuk	Terjaminnya kerahasiaan atas data pribadi seseorang	25 tahun

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26	menghindari Tindakan yang tidak diinginkan		
57	BKPSDM Kota Denpasar	Dokumen Konseling ASN	Hanya dapat diungkapkan pada ASN yang bersangkutan dan ASN lainnya untuk keperluan administrasi kepegawaian. Dasar Hukum: a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf H b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 c. Kode Etik Psikologi Indonesia Tahun 2010	Hasil konseling termasuk kedalam riwayat kesehatan yang tidak dapat dipublikasikan kecuali atas persetujuan oleh pasien yang bersangkutan	Terjaminnya kerahasiaan data Riwayat konseling	25 tahun
58	BKPSDM Kota Denpasar	Dokumen Proses Pemberhentian ASN	Hanya dapat diungkapkan pada ASN yang bersangkutan dan ASN lainnya untuk keperluan administrasi kepegawaian. Dasar Hukum: a. UU No 14 Th 2008 tentang	Berpengaruh kepada proses bisnis / proses pemberhentian	Terjaminnya pelaksanaan pemberhentian PNS	25 tahun

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			KIP pasal 17 huruf H b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26			
59	Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	Laporan parpol sebelum diaudit	Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses pemeriksaan laporan keuangan	Menjaga dan menjamin kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia sehingga dapat menciptakan situasi yang kondusif dalam pembahasan sebelum disampaikan kepada publik	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum
60	Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	Laporan Keuangan sebelum diaudit	Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses pemeriksaan laporan keuangan	Menjaga dan menjamin kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia sehingga dapat menciptakan situasi yang kondusif dalam pembahasan sebelum disampaikan kepada publik	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum
61	Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	Data Pribadi Ormas	Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Data melindungi data pribadi	Menyesuaikan pedoman jadwal retensi arsip

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
62	Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	Konfigurasi database aplikasi username dan password	Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membahayakan informasi Badan Publik	Terjaganya keamanan informasi Badan Publik	Menyesuaikan pedoman jadwal retensi arsip
63	Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	Biodata Pegawai (Alamat Rumah, Nomor Telepon/HP, Nomor Rekening Pribadi, Hutang, Riwayat Keluarga dan Dokumen bersifat pribadi lainnya)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan Data dan mengungkap rahasia pribadi	Mengamankan agar tidak terjadi penyalahgunaan data	Tidak Terbatas
64	Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	Daftar Akun, Password dan Data Inputan aplikasi/sistem yang digunakan ASN (Memuat email, LHKPN, pajak, sistem kepegawaian dan sistem aplikasi lainnya)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan Data dan mengungkap rahasia pribadi	Mengamankan agar tidak terjadi penyalahgunaan data	Tidak Terbatas
65	Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	SIMDA Barang	a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;	Dapat membahayakan Data Aset Pemerintah berkaitan dengan neraca Pemerintah Kota	Melindungi keamanan data aset pemerintah (Pemeriksaan BPK)	Selama masih digunakan

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan			
66	Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	Memorandum dan Disposisi Pimpinan	UU No. 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak sesuai	Mengamankan keputusan/kebijakan	Tidak Terbatas
67	Satpol PP Kota Denpasar	Memorandum dan Disposisi Pimpinan	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i	Dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak sesuai	Mengamankan keputusan/kebijakan	Tidak Terbatas
68	Satpol PP Kota Denpasar	Nota Dinas	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i	Mengganggu proses penyusunan / menghambat pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan	Tidak Terbatas
69	Satpol PP Kota Denpasar	Seluruh data, surat-surat, laporan dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	a. UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i b. UU No.43 Tahun 2009	Menimbulkan dampak negatif akibat penyebaran informasi yang belum akurat	Mencegah terjadinya penyalahgunaan serta kesalahpahaman informasi	Tidak Terbatas
70	Satpol PP Kota Denpasar	Arsip/dokumen Nota Dinas, Memo Pimpinan yang dinyatakan sangat rahasia, terbatas,	a. UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i b. UU No.43 Tahun 2009	Berpotensi terjadinya penyalahgunaan keputusan dan menghambat pengambilan kebijakan	Mengamankan keputusan/kebijakan	Tidak Terbatas

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
		berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya				
71	Satpol PP Kota Denpasar	Data Pribadi Pegawai	a. UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang bersangkutan
72	Satpol PP Kota Denpasar	Data Warga Negara penerima layanan Standar Pelayanan Minimal	-UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h -Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang bersangkutan
72	Satpol PP Kota Denpasar	Internet Protocol/IP Address Private	a. UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j b. UU No.11 Tahun 2008 pasal 30	Rentan akan peretasan pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga penyalahgunaan hak akses	Menjaga/melindungi hak akses	Selama masih digunakan/berlaku
73	Satpol PP Kota Denpasar	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia (data kekayaan) pribadi	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi)	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
74	Satpol PP Kota Denpasar	Bandwidth Management	a. UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j b. UU No.11 Tahun 2008 pasal 30	Rentan penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Melindungi keamanan sistem	Selama masih digunakan/berlaku
75	Satpol PP Kota Denpasar	Peta Lokasi Penyimpanan Arsip	a. UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i b. UU No.43 Tahun 2009 pasal 44	Mengungkap arsip yang menurut sifatnya rahasia	Melindungi penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berkepentingan	Selama masih digunakan/berlaku
76	Satpol PP Kota Denpasar	Rencana MoU (Kerjasama)	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf f	Mengganggu/menghambat proses kesuksesan kerjasama	Mendukung kesuksesan kerjasama	Sampai MoU dilaksanakan
77	Satpol PP Kota Denpasar	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 16 huruf g	Mengganggu proses penyusunan	Mencegah terjadinya kesalahpahaman	Sampai diaudit oleh tim audit
78	Satpol PP Kota Denpasar	Rencana kerja Anggaran Tahunan	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 16 huruf g	Mengganggu proses penyusunan	Mencegah terjadinya kesalahpahaman	Sampai diaudit oleh tim audit
79	Satpol PP Kota Denpasar	Rincian dokumen penawaran kontrak atau penawaran penyedia barang/jasa	a. UU No 14 Tahun 2008 pasal 6 poin 3 huruf b dan pasal 17 huruf b b. UU No.11 Tahun 2008 pasal 5 c. Perpres 16 Tahun 2018 pasal 7 huruf b	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak Terbatas
80	Satpol PP Kota Denpasar	Dokumen kontrak barang /jasa beserta lampirannya	a. UU No 14 Tahun 2008 pasal 6 poin 3 huruf b dan pasal 17 huruf b	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain,	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari	Tidak Terbatas

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			b. UU No.11 Tahun 2008 pasal 5 c. Perpres 16 Tahun 2018 pasal 7 huruf b	perlindungan HKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	persaingan usaha tidak sehat	
81	Satpol PP Kota Denpasar	Data pribadi Pelapor dan Pelanggar Perda dan Perwali	UU No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b dan h	Dapat mengganggu keamanan, kenyamanan dan privasi responden/informan serta dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Kepentingan pribadi dan hak asasi responden/informan dapat terlindungi	Dibuka apabila diijinkan oleh responden
82	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	Sistem Database Anggota Perpustakaan	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf H angka 5 b. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat membahayakan keselamatan individu	Melindungi keamanan data pribadi/individu	Selama pengungkapannya membahayakan privasi seseorang
83	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	Identitas Diri Responden Survey	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf H angka 5 b. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat membahayakan keselamatan individu	Melindungi keamanan data pribadi/individu	Selama pengungkapannya membahayakan privasi seseorang

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
84	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	Arsip Terbatas	a. Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Denpasar b. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis	Dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Melindungi keamanan data penyelenggara tugas dan fungsi lembaga pemerintah	Selama pengungkapannya membahayakan/ mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan
85	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	Berita Sandi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama berita masih bersifat rahasia
86	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	Lokasi Server	a. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25 b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan j	Dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengrusakan dan pencucian data)	Melindungi/ mengamankan perangkat serta data	Selama masih digunakan
87	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	Internet Protocol / IP Address Private	a. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25 b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan j	Memungkinkan adanya penerobosan/ penyalahgunaan hak akses	Menjaga/melindungi hak akses	Selama masih digunakan /berlaku

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
88	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	Database kasus kekerasan seksual pada Perempuan	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf H angka 5 b. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat membahayakan keselamatan individu	Melindungi keamanan data pribadi/individu	Selama pengungkapannya membahayakan privasi seseorang
89	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	Database kasus kekerasan seksual pada Anak	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf H angka 5 b. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat membahayakan keselamatan individu	Melindungi keamanan data pribadi/individu	Selama pengungkapannya membahayakan privasi seseorang
90	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	Internet Protocol / IP Address Private	a. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25 b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan j	Selama masih digunakan / berlaku	Memungkinkan adanya penerobosan / penyalahgunaan hak akses	Selama pengungkapannya membahayakan privasi

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
	Berencana Kota Denpasar					
91	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	Username dan Password Pengguna Aplikasi	Pasal 17 huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Memungkinkan adanya penerobosan / penyalahgunaan hak akses	Selama pengungkapannya membahayakan privasi seseorang
92	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	Data Pribadi Pegawai	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan Data Pribadi Pegawai	Selama pengungkapannya membahayakan privasi seseorang	Selama pengungkapannya membahayakan privasi seseorang
93	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	Data Kesehatan, Data keluarga, rekening, tabungan, pinjaman pegawai.	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (3) c dan Pasal 17	Informasi hak pribadi	Keamanan data pribadi	Tidak Terbatas

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
	Pintu Kota Denpasar					
94	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	Memorandum dan Disposisi Pimpinan	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Menghambat pengambilan keputusan	Mengamankan proses pengambilan keputusan	Tidak Terbatas
95	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	Nota Dinas	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Mengganggu penyusunan/ kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan	Tidak Terbatas
96	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	Semua data/surat/laporan yang masih dalam proses	UU No.14 Tahun 2008 & UU No.43 Tahun 2009	Mengganggu penyusunan	Mengamankan proses pengambilan keputusan	Tidak Terbatas

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
97	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	Arsip/Nota Dinas/Memo Pimpinan rahasia	UU No.14 Tahun 2008 & UU No.43 Tahun 2009	Mengganggu penyusunan	Mengamankan proses pengambilan keputusan	Tidak Terbatas
98	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	Kode Akses Elektronik	UU ITE Pasal 1 angka 6	Rentan Penyalahgunaan	Keamanan sistem	Tidak Terbatas
99	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	User name dan Password Pengguna Aplikasi	Pasal 17 huruf c UU No.14 Tahun 2008	Berpotensi disalahgunakan	Keamanan sistem	Tidak Terbatas
100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	Data/ dokumen perusahaan secara individual yang mengandung data pribadi/ perusahaan pada Dokumen	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b dan h.	Rentan Penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan nasional	Dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan tidak sehat	Diminta pihak yang berwenang

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
	Pintu Kota Denpasar	Perizinan dan Non perizinan	b. UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 4 Ayat (2); c. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 36;			
101	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	Rencana Awal Investasi Dalam Negeri	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf e angka 5 (rencana awal investasi);	Rentan Penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan nasional	Dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan tidak sehat	a. Sampai press release realisasi investasi oleh BKPM b. Diminta pihak yang berwenang
102	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Database Pribadi Pegawai	UU No 14 Th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf H	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan
103	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Pelapor Pro Denpasar	UU No 14 Th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf H	Dapat menimbulkan konflik antara pelapor dan dilapor	Menjaga rahasia dan keamanan pribadi seseorang	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan
104	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Dokumen detail UKL-UKL-SPPL	UU No 14 Th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf H	Dapat merugikan pemilik dokumen	Menjaga keamanan rahasia dokumen pemilik dokumen	Sampai pihak yang mempunyai dokumen memberi persetujuan

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
105	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Dokumen detail persetujuan Teknis dan surat kelayakan operasional bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan	UU No 14 Th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf H	Dapat merugikan pemilik dokumen	Menjaga keamanan rahasia dokumen pemilik dokumen	Sampai pihak yang mempunyai dokumen memberi persetujuan
106	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	Data rekam medis pasien	a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf H b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis	Dapat mengungkap riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang	Menjamin kerahasiaan privasi seseorang	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan
107	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	Data Pribadi Pegawai	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf H b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 c. UU No. 24 Th 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan
108	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	Rancangan keputusan pimpinan	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, bersifat belum	Melindungi pertahanan dan keamanan negara. Menjaga penyalahgunaan/salah	Selama rancangan keputusan tersebut telah ditetapkan dan mengikat

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
				pasti/belum mengikat/belum ditetapkan	tafsir terkait materi/pokok rancangan keputusan	
109	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	Laporan Keuangan yang belum diaudit	a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP b. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, dan mengganggu proses bisnis/tusi OPD	Melindungi pertahanan dan keamanan negara, menjaga penyalahgunaan/salah tafsir/ perbedaan laporan	Selama masih digunakan/berlaku/telat diaudit oleh BPK
110	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	Sistem Manajemen Database	a. UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 b. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j	Dapat mengganggu keamanan database	Menjaga keamanan database	Selama masih digunakan/berlaku
111	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	Topologi Jaringan Intranet dan Internet	a. UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 b. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j	Dapat mengganggu keamanan jaringan	Melindungi keamanan jaringan	Selama masih digunakan/berlaku
112	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	User ID dan Password aplikasi	a. UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 b. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j	Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses	Melindungi keamanan jaringan	Selama masih digunakan/berlaku

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
113	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	Data Pribadi Pegawai	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf H	Dapat mengungkap data pribadi pegawai	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat pribadi	Selama PNS tersebut masih melaksanakan tugas/masih berlaku
114	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	Rencana Kerja dan Anggaran yang belum disahkan	a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j ;	Dapat menghambat proses penyusunan yang masih dalam proses pembahasan	Dapat memperlancar proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Selama jangka waktu yang dibutuhkan dalam pengesahan dokumen
115	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	Data Pribadi atau data perseorangan meliputi semua elemen Biodata yang ada di Data Base termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan: Pasal 1 Angka 22 Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya Pasal 8 ayat (1) huruf e, Instansi Pelaksana	Rawan penyalahgunaan data untuk kejahatan perbankan dan transaksi keuangan serta tindakan kriminal lainnya	Melindungi kerahasiaan, kebenaran dan kevalidan data penduduk	Terbuka selama mendapatkan ijin tertulis dari yang bersangkutan

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan berkewajiban menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Pasal 58 ayat (2) bahwa data perseorangan meliputi nomor kartu keluarga; nomor induk kependudukan; nama lengkap; jenis kelamin; tempat lahir; tanggal/bulan/tahun lahir; golongan darah; agama/kepercayaan; status perkawinan; status hubungan dalam keluarga; cacat fisik dan/ atau mental; Pendidikan terakhir; jenis pekerjaan; NIK ibu kandung; nama ibu kandung; NIK ayah; nama ayah; alamat sebelumnya; alamat sekarang; kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; nomor akta kelahiran/ nomor surat kenal lahir; kepemilikan akta perkawinan/ buku nikah; nomor akta			

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			perkawinan/ buku nikah; nomor akta perceraian/ surat cerai; tanggal perceraian; sidik jari; iris mata; tanda tangan; dan elemen data lainnya merupakan aib seseorang			
116	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	User ID dan Password Aplikasi terkait Layanan Administrasi Kependudukan				
		a. User ID dan Password Aplikasi SIAK	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan : Pasal 1 Angka 21 Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi	Rawan penyalahgunaan kewenangan dalam pemrosesan dan verifikasi ajuan administrasi kependudukan	Melindungi pemilik akun/operator SIAK dari perbuatan yang melanggar aturan dalam pemrosesan dan verifikasi ajuan administrasi kependudukan	Selama hak akses masih berlaku/aktif

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan. Pasal 8 ayat (1) huruf e, Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dan huruf f, melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil			
		b. User ID dan Password Aplikasi Pendaftaran Daring Dukcapil Kota Denpasar (TARINGDUKCAPIL) untuk ajuan online dari masyarakat/	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan : Pasal 1 Angka 22 Data Pribadi adalah data perseorangan	Rawan penyalahgunaan pengajuan administrasi kependudukan bukan oleh yang bersangkutan karena produk dari ajuan	Melindungi pemilik akun dan keluarga dari penyalahgunaan dokumen administrasi kependudukan yang akan merugikan	Selamanya

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
		petugas registrasi desa dan kelurahan	tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya Pasal 8 ayat (1) huruf e, Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting	yang berupa TTE dapat secara langsung diunduh melalui akun TARINGDUKCAPIL yang dikirimkan ke email yang didaftarkan		
117	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	Register Akta Pencatatan Sipil	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 9 Ayat 1 Huruf c; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 79 Ayat 1;	Rawan penyalahgunaan data untuk kejahatan perbankan dan transaksi keuangan serta tindakan kriminal lainnya	Melindungi kerahasiaan dan kebenaran data penduduk	Terbuka untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan, yang bersangkutan

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;			
118	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	Berkas permohonan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil melalui online atau offline	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 9 Ayat 1 Huruf c; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 79 Ayat 1; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Rawan penyalahgunaan data untuk kejahatan perbankan dan transaksi keuangan serta tindakan kriminal lainnya	Melindungi kerahasiaan dan kebenaran data penduduk	Terbuka untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan, yang bersangkutan
119	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	Data Balikan pemanfaatan Data Kependudukan yang sudah diberikan hak akses oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri melalui perjanjian	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 96A; Permendagri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas	Rawan penyalahgunaan data untuk kejahatan perbankan dan transaksi keuangan serta tindakan kriminal lainnya	Menjamin kerahasiaan, keutuhan serta tidak melakukan penyimpangan data kependudukan yang telah diakses dan tidak memberikan data kepada pihak lain	Terbuka selama mendapatkan ijin tertulis dari yang bersangkutan

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
		kerjasama dengan OPD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan dalam Pasal 1 dan Pasal 7			
120	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	Data Center dan Server	a. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 Huruf a dan angka 5 b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi informasi dan transaksi elektronik, Pasal 25	1. Dapat membahayakan keamanan perangkat serta data 2. Dapat menggunakan perlindungan hak atas kekayaan intelektual 3. Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses	1. Melindungi / mengamankan perangkat serta data 2. Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan melindungi hak akses	Selama masih digunakan / berlaku
121	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	User ID dan Password Aplikasi	a. UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi informasi dan transaksi elektronik, Pasal 25 b. UU no. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j	1. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual 2. Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses	1. Melindungi hak atas kekayaan intelektual 2. Menjaga / melindungi hak akses	Selama masih digunakan / berlaku
122	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	Internet Protocol / IP Address Privat	a. UU no.11 Tahun 2008 tentang informasi dan	1. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	1. Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama masih digunakan / berlaku

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			transaksi informasi dan transaksi elektronik, Pasal 25 b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j	2. Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses	2. Menjaga / melindungi hak akses	
123	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	Bandwidth Management	a. UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi informasi dan transaksi elektronik, Pasal 25 b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j	1. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual 2. Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses	1. Melindungi hak atas kekayaan intelektual 2. Menjaga / melindungi hak akses	Selama masih digunakan / berlaku
124	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	Identitas Pribadi Perangkat Daerah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkapkan data pribadi perangkat daerah	Melindungi data pribadi perangkat daerah yang bersifat pribadi	Selama perangkat daerah tersebut masih melakukan tugas
125	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	Data penghasilan pribadi perangkat daerah secara mendetail	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkapkan data pribadi perangkat daerah	Melindungi data pribadi perangkat daerah yang bersifat pribadi	Selama perangkat daerah tersebut masih melakukan tugas
126	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	Dokumen Proses Pengelolaan Kepegawaian (Kenaikan Gaji, Berkala, Mutasi, Pensiun dan Administrasi Kepegawaian)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkapkan data pribadi perangkat daerah	Melindungi data pribadi perangkat daerah yang bersifat pribadi	Selama perangkat daerah tersebut masih melakukan tugas

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
127	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	Dokumen rencana pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Daerah dalam dan dari Jabatan struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku dan dipergunakan dan pengambilan keputusan terkait
128	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	SK Pengangkatan dan pemberhentian perangkat daerah dalam dan dari jabatan struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/ menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan pelaksanaan pelantikan
129	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Dapat Menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang /jasa	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/ jasa	Sampai dilakukan pemenang
130	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	Peta Lokasi / Penyimpanan Arsip	a. UU No.14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf l b. UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan	Membahayakan keamanan arsip dan lokasi penyimpanan	Mengamankan Arsip dan Lokasi Penyimpanan Arsip (Kerahasiaan Lokasi terjaga)	Tidak terbatas
131	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	Memorandum / Surat-surat penting yang perlu dirahasiakan	a. UU No.18 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Mengganggu proses pelaksanaan kegiatan	Melancarkan pelaksanaan kegiatan	Selama masih berlaku

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			b. UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 h			
132	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	Memorandum dan Disposisi Pimpinan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat pengambilan kebijakan	Mengamankan pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
133	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	Nota Dinas	Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah	Menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
134	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	Semua data dan surat-surat laporan, penelitian dan lainnya yang masih proses atau belum didokumentasikan	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
135	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	Segala jenis arsip pimpinan yang dinyatakan sangat rahasia	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat pengambilan kebijakan	Mengamankan pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
136	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi	Data pribadi, keluarga, rekening pegawai yang	Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)	Penyalahgunaan data pribadi	Melindungi keamanan data dan hak-hak pribadi	Tidak terbatas

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
	Kompetensi Kota Denpasar	menurut peraturan tidak wajib dibuka				
137	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	Lokasi penyimpanan arsip	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Penyalahgunaan atau membuka arsip yang dirahasiakan	Melindungi penyalahgunaan arsip oleh yang tidak berkepentingan	Selama masih berlaku
138	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	Lokasi, data, user dan password server	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE Pasal 30-37 c. PP PSTE No. 82 Tahun 2012 pasal 7 ayat 1, Pasal 12 ayat 1 (b) d. Permenkominfo No. 4 Tahun 2016	Terkait kebocoran data dan masalah keamanan	Keamanan sistem	Tidak terbatas
139	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	User dan Pasword Sistem Aplikasi Dinas	1.UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2.UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30-37 3.PP PSTE No.82 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 1. Pasal 12 ayat 1 4.Permenkominfo No.4 Tahun 2016	Terkait kebocoran data masalah keamanan	Keamanan Sistem	Tidak Terbatas

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
140	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	Data pribadi, keluarga, PMI (Pekerja Migran Indonesia)	Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)	Penyalahgunaan data pribadi	Melindungi keamanan data dan hak-hak pribadi	Tidak terbatas
141	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	Data pribadi, keluarga, TKA (Tenaga Kerja Asing)	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)	Penyalahgunaan data pribadi	Melindungi keamanan data dan hak hak pribadi	Tidak Terbatas
142	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	Data pribadi, keluarga, Pimpinan LPK dan Peserta Pelatihan	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)	Penyalahgunaan data pribadi	Melindungi keamanan data dan hak hak pribadi	Tidak Terbatas
143	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	Data mediasi perselisihan hubungan industrial	Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Penyalahgunaan data Perusahaan dan Pekerja	Melindungi keamanan data, hak-hak Perusahaan dan Pekerja	Sesuai peraturan yang berlaku
144	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	Data perusahaan dan pekerja yang menyelesaikan administrasi hubungan industrial	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	Penyalahgunaan data Perusahaan dan Pekerja	Melindungi keamanan data, hak-hak Perusahaan dan Pekerja	Sesuai peraturan yang berlaku

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
145	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Data Center dan Server	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan angka 5 b. UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25	1. Dapat membahayakan keamanan perangkat serta data 2. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual 3. Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses	1. Melindungi/ mengamankan perangkat serta data 2. Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan melindungi hak ases	Selama masih digunakan /berlaku
146	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Source Code Aplikasi/Program	a. UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j	1. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual 2. Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses	1. Melindungi hak atas kekayaan intelektual 2. Menjaga/melindungi hak akses	Selama masih digunakan /berlaku
147	Dinas Pertanian Kota Denpasar	User ID dan Password Aplikasi	a. UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j	1. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual 2. Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses	1. Melindungi hak atas kekayaan intelektual 2. Menjaga/melindungi hak akses	Selama masih digunakan /berlaku
148	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Internet Protocol/IP Adress Privat	a. UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25	1. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	1. Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama masih digunakan /berlaku

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j	2. Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses	2. Menjaga/melindungi hak akses	
149	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Bandwidth Management	a. UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j	1. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual 2. Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses	1. Melindungi hak atas kekayaan intelektual 2. Menjaga/melindungi hak akses	Selama masih digunakan /berlaku
150	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Database dan Sistem Manajemen Database	a. UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j	1. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual 2. Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses	1. Melindungi hak atas kekayaan intelektual 2. Menjaga / melindungi hak akses	Selama masih digunakan /berlaku
151	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Identitas Pribasi Perangkat OPD	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkapkan data Pribadi Perangkat OPD	Melindungi data Pribadi Perangkat OPD yang bersifat Pribadi	Selama Perangkat OPD tersebut masih melaksanakan Tugas
152	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Data Penghasilan Pribadi Perangkat OPD Secara Mendetail	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkapkan data Pribadi Perangkat OPD	Melindungi data Pribadi Perangkat OPD yang bersifat Pribadi	Selama Perangkat OPD tersebut masih melaksanakan Tugas
153	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Dokumen Proses Pengelolaan Kepegawaian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkapkan data Pribadi Perangkat OPD	Melindungi data Pribadi Perangkat OPD yang bersifat Pribadi	Selama OPD tersebut masih melaksanakan Tugas

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
		(Kenaikan gaji berkala, Mutasi, Pensiun dan Administrasi Kepegawaian)				
152	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Dokumen rencana Pengangkatan dan Pemberhentian OPD dalam dan dari Jabatan struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku dan diperlukan dan pengambilan keputusan terkait
153	Dinas Pertanian Kota Denpasar	SK Pengangkatan dan Pemberhentian OPD dalam dan dari Jabatan struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan Pelaksanaan Pelantikan
154	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan di bidang barang/jasa	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Sampai dilakukan pemenang
155	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Peta Lokasi/ Penyimpanan Arsip	UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf l	Membahayakan keamanan arsip dan lokasi penyimpanan	Mengamankan Arsip dan Lokasi Penyimpanan Arsip (Kerahasiaan Lokasi terjaga)	Tidak terbatas

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
156	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Data lokasi (alamat, Banjar, Desa/ Kelurahan) kasus Positif Rabies	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Asas dan Tujuan BAB II Bagian Kesatu, Pasal 2 Ayat 4	Menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat mengetahui 1 lokasi banyak terjadi kasus Positif Rabies dan untuk menjaga image satu lokasi dari Kasus Rabies	Untuk melindungi wilayah yang kasus Positif Rabiesnya cukup tinggi	Tidak terbatas
157	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Data pribadi pegawai yang meliputi: Biodata, Tanda tangan, Penilaian Kinerja	a. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Berpotensi menyebabkan penyalahgunaan data pribadi	Melindungi informasi data pribadi pegawai	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh yang bersangkutan dan aparat penegak hukum
158	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Informasi/ akses pada seluruh rekening bank milik Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	a. Undang-Undang terbaru tentang Perbankan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan b. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga	Berpotensi menyebabkan penyalahgunaan data atau manipulasi data	Melindungi informasi data Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh aparat penegak hukum dengan menyertakan surat persetujuan secara tertulis

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			c. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga			
159	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Username dan password pengguna aplikasi data-data pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	a. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. SK Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar Nomor: 100.3.3/34/DPKP/2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Data, Informasi Elektronik dan Non Elektronik pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Berpotensi menyebabkan penyalahgunaan data atau manipulasi data	Melindungi informasi data Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh yang bersangkutan dan aparat penegak hukum
160	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Username dan password sebagai PPK Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan pada Aplikasi Layanan Pengadaan	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi menyebabkan penyalahgunaan data atau manipulasi data	Melindungi informasi data Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh yang bersangkutan dan aparat penegak hukum

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
		Secara Elektronik (LPSE) Kota Denpasar				
161	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	Dokumen pengadaan barang/jasa yang masih dalam proses evaluasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 17 huruf i; Perki No. 1 Tahun 2021	Dapat mengganggu proses pengadaan dan persaingan usaha yang sehat	Menjamin proses pengadaan berlangsung objektif, adil, dan akuntabel.	Sampai proses penyusunan kebijakan pengadaan barang/jasa selesai dan pemenang ditetapkan.
162	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	Dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 17 huruf i; Perki No. 1 Tahun 2021	Dapat mengganggu penetapan DPA karena masih ada reviw atau perubahan -perubahan yang dilakukan sampai terselesaikannya dalam bentuk DPA	Menjamin proses penetapan DPA berjalan lancar dan sesuai dengan regulasi yang berlaku	Sampai proses penetapan DPA rampung
163	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	Data pribadi pegawai (NIK, rekening bank, NPWP)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h; UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Berpotensi disalahgunakan dan melanggar hak privasi	Melindungi keamanan serta hak pribadi pegawai.	Selama data masih berlaku.

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
164	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	Data pribadi penerima bantuan, hibah, atau penghargaan di bidang kebudayaan (NIK, Rekening Bank, NPWP)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h; UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Berpotensi melanggar privasi penerima manfaat	Melindungi data pribadi masyarakat.	Selama data masih digunakan.
165	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	Data Penghasilan Pribadi Pegawai	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkapkan data pribadi pegawai	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat pribadi	Selama pegawai tersebut masih melaksanakan tugas
166	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	Dokumen Proses Pengelolaan Kepegawaian (Kenaikan Gaji, Berkala, Mutasi, Pensiunan, dan Administrasi Kepegawaian)	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkapkan data pribadi pegawai	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat pribadi	Selama pegawai tersebut masih melaksanakan tugas

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
167	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	User ID dan Password Aplikasi	a. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 b. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j	a. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual b. Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses	a. Melindungi hak atas kekayaan intelektual b. Menjaga/melindungi hak akses	Selama masih digunakan./berlaku
168	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	Data pribadi pegawai	UU KIP dan UU ASN	Rahasia pribadi individu	Dikecualikan untuk Seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/ hukum)	Dikecualikan untuk Seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)
169	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	Data pribadi Pelaku Usaha	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Rahasia pribadi individu	Dikecualikan untuk Seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)	Dikecualikan untuk Seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)
170	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	Data pribadi Pemilik Industri	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Rahasia pribadi individu	Dikecualikan untuk Seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)	Dikecualikan untuk Seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)
171	Dinas Perindustrian	Surat Keterangan Asal (SKA) dan	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun	1. Memuat nama importir sehingga bisa	Dikecualikan untuk Seterusnya (kecuali atas	Dikecualikan untuk Seterusnya (kecuali atas

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
	dan Perdagangan Kota Denpasar	dokumen lainnya di bidang perdagangan luar negeri	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	dimanfaatkan eksportir lainnya untuk merebut pembeli (buyer) 2. Memuat harga barang yang bisa dimanfaatkan oleh eksportir lain yang sejenis dalam menentukan harga	permintaan pihak berwajib/hukum)	permintaan pihak berwajib/hukum)
172	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar	Data Pribadi Pegawai a. Kode Etik b. Pelanggaran Disiplin c. Informasi Pribadi	a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf H b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik Pasal 26	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan
173	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar	Laporan Keuangan yang Belum di audited	UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga kerahasiaan laporan keuangan sebelum keluar hasil audit oleh pihak yang berwenang	Selama belum di audit
174	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar	Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, terbatas,	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf I	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
		berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	b. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
175	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar	Kode akses (username dan password) Aplikasi, termasuk password website dan password email	UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Selama kode masih digunakan
176	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar	Data Aset dan Neraca Koperasi	UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian	Membuka rahasia Aset dan Neraca Koperasi membahayakan keamanan keuangan koperasi.	Melindungi Data Aset dan Neraca Koperasi	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Koperasi
177	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar	Laporan Hasil Pemeriksaan Koperasi	a. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 39 ayat 3 b. Permenkop UKM RI No. 9 Tahun 2020	-Dapat menimbulkan keresahan anggota Menurunnya kepercayaan anggota terhadap Koperasi -Dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab	Menjaga kepercayaan anggota koperasi	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Koperasi

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
178	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar	Data Tenant Inbis terkait: a. Data pribadi (no ktp, no. Hp pribadi, alamat rumah, npwp) b. Data Usaha (omzet usaha)	PP 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	Menjaga privasi data	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan
179	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar	Data UMKM Binaan Terkait Data Pribadi	a. PP 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah b. UU No. 7 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) Mengatur Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	Dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab	Menjaga Kepercayaan UMKM Binaan Untuk Memberikan Data Pada Pemerintah	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan pelaku UMKM binaan
180	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	Maraknya kasus kekerasan anak (kekerasan fisik, psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi,	Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman	Kasus kekerasan anak yang viral di media sosial dapat berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan anak baik bagi korban dan	Penangan kasus dilakukan oleh Kelompok Kerja Sekolah Nyaman dan Nyaman Kota Denpasar	Semasih berlaku

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
		intoleransi, dan kebijakan yang mengandung kekerasan) viral di media sosial		pelaku seperti tergangunya kesehatan mental, perkembangan sosial, dan pendidikan. Kasus kekerasan anak yang viral di media sosial juga dapat berkontribusi pada meningkatnya angka kriminalitas di masyarakat.		
181	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	Data pribadi Pegawai, Guru dan Murid di Dinas Dikpora Kota Denpasar yang bersifat spesifik (NISN, NIK, No Telephone, data biometri, data genetika, Riwayat Kesehatan, Data Keuangan pribadi, Aset, Pendapatan, Rekening, orientasi seksual, pandangan politik, catatan	UU No. 27 Tahun 2022 adalah Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi , Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Jika Data pribadi seseorang dibuka untuk umum maka konsekuansinya dapat disalahgunakan untuk berbagai tindakan kejahatan, termasuk penipuan, pencurian identitas, dan penyalahgunaan untuk pinjaman online. Pelaku dapat menggunakan informasi seperti KTP, nomor telepon, dan data perbankan untuk	Keamanan data pribadi tidak hanya penting untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi, tetapi juga untuk mencegah dampak negatif yang bisa muncul akibat kebocoran atau kehilangan data. Sebuah kebocoran data bisa mengakibatkan kerugian finansial, kerusakan reputasi, hingga tindakan kriminal seperti pencurian identitas.	Selalu berlaku

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
		kejahatan , data anak dan/ data lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, menurut situs resmi BPK RI)		melakukan tindakan yang merugikan korban, seperti mengajukan pinjaman fiktif, membuka rekening bank baru, atau melakukan transaksi tanpa izin.		
182	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	Data Cuti Sakit Pegawai, Guru dan Muris di Dinas Dikpora Kota Denpasar	UU Kesehatan (UU No. 36 Tahun 2009): Pasal 57 mengatur tentang hak pasien atas kerahasiaan medis, termasuk data terkait cuti sakit.	Penyebaran data cuti sakit dapat membuat mereka merasa tidak nyaman, malu, atau bahkan terintimidasi.	Keamanan data cuti sakit tidak hanya penting untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi, tetapi juga untuk mencegah dampak negatif yang bisa muncul akibat kebocoran atau kehilangan data. Sebuah kebocoran data bisa mengakibatkan kerugian finansial, kerusakan reputasi, hingga tindakan kriminal seperti pencurian identitas.	Semasih berlaku
183	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	Laporan Keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 huruf H UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	-Belum terjaminnya kebenaran informasi	-Laporan keuangan yang belum diaudit tidak ter-ekspose	Sampai audit selesai

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
184	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	Kode akses (username dan password) Aplikasi, Internet/WiFi. Termasuk password website dan password email	UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Selama Kode Masih Digunakan
185	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	Data Pribadi Pegawai	Pasal 17 huruf H UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	1. Menjaga Privasi 2. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	1. Selama yang bersangkutan menjadi pegawai 2. Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan
186	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	Peta Lokasi/Penyimpanan Arsip	UU No.43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	Membahayakan keamanan arsip dan lokasi penyimpanan	1.Mengamankan Arsip dan Lokasi Penyimpanan Arsip (Kerahasiaan Lokasi terjaga)	Tidak Terbatas
187	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	Data Pelapor Pro Denpasar	Pasal 17 huruf H UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat menimbulkan konflik antara pelapor dan dilapor	Menjaga rahasia dan keamanan pribadi seseorang	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan
188	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	Riwayat dan kondisi rahasia pribadi dan keluarga pegawai ASN				
		a. Biodata pegawai	Pasal 17 huruf h angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	1. Menjaga privasi 2. Melindungi dari penyalahgunaan	1. Selama yang bersangkutan menjadi PNS

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
					data/informasi yang bersangkutan	2. Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan
		b. Dokumen/berkas kepegawaian PNS	UU No. 14/2008 pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	1. Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan 2. Menjaga privasi	1. Selama yang bersangkutan menjadi PNS 2. Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan
		c. Identitas PNS yang melanggar disiplin/dijatuhi hukuman disiplin	UU No. 14/2008 pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	1. Menjaga privasi 2. Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan	1. Selama yang bersangkutan menjadi PNS 2. Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan
		d. Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian	UU No. 14/2008 pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	1. Selama yang bersangkutan menjadi PNS 2. Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan
		e. Data pribadi Pegawai kontrak/Non-PNS	UU No. 14/2008 pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	1. Menjaga privasi 2. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	1. Selama yang bersangkutan menjadi PNS 2. Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
189	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan dan hasil pengukuran kompetensi pegawai				
		a. Data rekam medis	a. Pasal 17 huruf h angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP b. UU Kesehatan 23/1992 pasal 57 ayat (1) "Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan."	Mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia	Mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan
		b. Data pegawai yang terpapar HIV dan AIDS	a. Pasal 17 huruf h angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP b. Pasal 7 huruf c dan Pasal 8 huruf b Perda Provinsi DIY Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS. Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap data pribadi ODHA yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ODHA yang bersifat rahasia	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan
		c. Hasil ujian kompetensi tenaga kerja Non-PNS	Pasal 17 huruf h angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	1. Menjaga privasi 2. Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
190	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang/pribadi				
		a. Laporan Keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Belum terjaminnya kebenaran informasi	Laporan keuangan yang belum diaudit tidak ter-ekspose	Sampai audit selesai
		b. Rekening Bank pribadi pegawai, komisioner dan Pegawai Kontrak/Non-PNS	a. Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 1 angka 6 c. UU No. 10 Tahun 1998 pasal 40 ayat 1: "Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai penyimpan dan simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana diatur dalam pasal 41-44 dan UU No. 14/2008 pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan rekening bank	Selama rekening masih digunakan
191	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapasitas, intelektual, dan rekomendasi kemampuan seseorang				

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
		a. Daftar nilai DP3/SKP Pegawai	Pasal 17 huruf h angka 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Selama 3 periode penilaian
		b. Data usulan pemindahan, pengangkatan dan pemberhentian PNS dari jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum	Pasal 17 huruf h angka 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja	Sampai diterbitkannya SK
		c. Data usulan Pemindahan dan Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	Pasal 17 huruf h angka 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja	Sampai terlaksananya pelantikan dan pengambilan sumpah
192	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	Surat-surat yang bersifat rahasia dengan kode X Sangat Rahasia (SR) dan Rahasia (R)	Peraturan Gubernur DIY Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Prov. DIY	Menghambat Kebijakan Pimpinan	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja	Hingga proses surat tersebut selesai
193	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang dan Jasa.	a. Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa pasal 66 b. Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang dan Jasa	Menimbulkan penilaian yang tidak objektif	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar	Selama proses pengadaan barang dan jasa

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
194	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	Dokumen Penawaran kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	a. Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa pasal 66 b. Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang dan Jasa	Muncul persaingan usaha tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas Penilaian	Selama proses pengadaan barang dan jasa
195	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	Kode akses (username dan password) Aplikasi Intrernet/WiFi, termasuk password website dan password email	UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Selama kode masih digunakan
196	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	Kronologi dan proses mediasi	Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1/2008 pasal 1 ayat 12	Mengungkap masalah pribadi para pihak yang bersifat rahasia	1. Menjaga privasi 2. Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan	Apabila mendapat persetujuan dari para pihak
197	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	Dokumen persidangan adjudikasi yang terkait dengan informasi yang dikecualikan	Pasal 26 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1/2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	1. Menjaga privasi 2. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Apabila mendapat persetujuan dari para pihak dan Majelis Komisioner

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
198	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	Rekaman elektronik persidangan adjudikasi yang memuat informasi yang dikecualikan	Pasal 33 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1/2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	1. Menjaga privasi 2. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Apabila mendapat persetujuan dari para pihak dan Majelis Komisioner Dapat diberikan dalam bentuk cetak dengan penghitaman/ pengaburan pada bagian informasi yang dikecualikan
199	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	Hasil Uji Kompetensi (tes tertulis dan psikotest) Seleksi Calon Anggota KPID	Pasal 17 huruf h angka 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap data pribadi calon yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan
200	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	Hasil penilaian Dewan Juri Anugerah Penyiaran	Pasal 17 huruf h angka 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap data pribadi/rahasia bisnis lembaga penyiaran	Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan
201	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	Hasil penilaian dan evaluasi Forum Rapat Bersama (FRB) dalam rangka permohonan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP)	Pasal 17 huruf h angka 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap data pribadi/rahasia bisnis lembaga penyiaran	Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan	Apabila mendapat persetujuan dari pemohon IPP
202	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	Informasi yang tidak boleh diungkapkan	Pasal 17 huruf j UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP	Sesuai alasan yang tersurat dalam peraturan perundang-	Sesuai alasan yang tersurat dalam peraturan	Sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
		berdasarkan Undang-Undang		undangan yang berlaku	perundang-undangan yang berlaku	
203	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	Riwayat dan kondisi rahasia pribadi penyewa Gedung Dharma Negara Alaya	UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE	Mengungkap data pribadi wajib retribusi Gedung DNA yang bersifat rahasia	1. Menjaga privasi 2. Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan
204	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	Pemberian Keringan kepada Wajib Retribusi Gedung Dharma Negara Alaya	Peraturam Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2023	Mengungkap data pribadi wajib retribusi Gedung DNA yang mendapatkan keringanan biaya	1. Menjaga privasi 2. Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan
205	Dinas Sosial Kota Denpasar (Bidang Penanganan Fakir Miskin)	Data By Name By Address (BNBA) DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pblik Pasal 17 huruf c angka 6 b. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik c. UU No. 27 Tahun 2022 adalah Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi.	1. Berpotensi melanggar UU 14/2008 dan UU Perlindungan Data Pribadi (UU 27/2022). 2. Risiko penyalahgunaan data pribadi	1. Sesuai Hukum, Tidak melanggar ketentuan keterbukaan informasi publik. 2. Perlu diuji secara berkala: Bila klasifikasi informasi berubah maka wajib diperbarui statusnya. 3. Meningkatkan akuntabilitas: Dengan menunjukkan bahwa penutupan informasi dilakukan berdasarkan uji konsekuensi	Sesuai waktu yang dibutuhkan dengan catatan bisa berubah jika Persetujuan tertulis dari pihak terkait,

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
		Data by Name By Address PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6 b. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik c. UU No. 27 Tahun 2022 adalah Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi.	1. Berpotensi melanggar UU 14/2008 dan UU Perlindungan Data Pribadi (UU 27/2022). 2. Risiko penyalahgunaan data pribadi	1. Sesuai Hukum, Tidak melanggar ketentuan keterbukaan informasi publik. 2. Perlu diuji secara berkala: Bila klasifikasi informasi berubah maka wajib diperbarui statusnya. 3. Meningkatkan akuntabilitas: Dengan menunjukkan bahwa penutupan informasi dilakukan berdasarkan uji konsekuensi	Sesuai waktu yang dibutuhkan dengan catatan bisa berubah jika : Persetujuan tertulis dari pihak terkait,
		Data by Name by Address DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional)	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6 b. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik c. UU No. 27 Tahun 2022 adalah Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi.	1. Berpotensi melanggar UU 14/2008 dan UU Perlindungan Data Pribadi (UU 27/2022). 2. Risiko penyalahgunaan data pribadi	1. Sesuai Hukum, Tidak melanggar ketentuan keterbukaan informasi publik. 2. Perlu diuji secara berkala: Bila klasifikasi informasi berubah maka wajib diperbarui statusnya. 3. Meningkatkan akuntabilitas: Dengan menunjukkan bahwa penutupan informasi	Sesuai waktu yang dibutuhkan dengan catatan bisa berubah jika : Persetujuan tertulis dari pihak terkait,

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
					dilakukan berdasarkan uji konsekuensi	
206	Dinas Sosial Kota Denpasar (Bidang Pemberdayaan Sosial)	Data by Name by Address PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial)	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6 b. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik c. UU No. 27 Tahun 2022 adalah Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi.	1. Berpotensi melanggar UU 14/2008 dan UU Perlindungan Data Pribadi (UU 27/2022). 2. Risiko penyalahgunaan data pribadi	1. Sesuai Hukum, Tidak melanggar ketentuan keterbukaan informasi publik. 2. Perlu diuji secara berkala: Bila klasifikasi informasi berubah maka wajib diperbarui statusnya. 3. Meningkatkan akuntabilitas: Dengan menunjukkan bahwa penutupan informasi dilakukan berdasarkan uji konsekuensi	Sesuai waktu yang dibutuhkan dengan catatan bisa berubah jika : Persetujuan tertulis dari pihak terkait,
207	Dinas Sosial Kota Denpasar (Sekretariat)	Informasi atau dokumen pribadi pegawai yang terkait dengan keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6 b. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik c. UU No. 27 Tahun 2022 adalah Undang-Undang	1. Berpotensi melanggar UU 14/2008 dan UU Perlindungan Data Pribadi (UU 27/2022). 2. Risiko penyalahgunaan data pribadi	1. Sesuai Hukum, Tidak melanggar ketentuan keterbukaan informasi publik. 2. Perlu diuji secara berkala: Bila klasifikasi informasi berubah maka wajib diperbarui statusnya. 3. Meningkatkan akuntabilitas: Dengan	Sesuai waktu yang dibutuhkan dengan catatan bisa berubah jika : Persetujuan tertulis dari pihak terkait,

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			tentang Pelindungan Data Pribadi.		menunjukkan bahwa penutupan informasi dilakukan berdasarkan uji konsekuensi	
		Informasi pada Dokumen Rancangan Kegiatan Anggaran yang belum disahkan	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6 b. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik c. UU No. 27 Tahun 2022 adalah Undang-Undang tentang	1. Berpotensi melanggar UU 14/2008 dan UU Perlindungan Data Pribadi (UU 27/2022). 2. Risiko penyalahgunaan data pribadi	1. Sesuai Hukum, Tidak melanggar ketentuan keterbukaan informasi publik. 2. Perlu diuji secara berkala: Bila klasifikasi informasi berubah maka wajib diperbarui statusnya. 3. Meningkatkan akuntabilitas: Dengan menunjukkan bahwa penutupan informasi dilakukan berdasarkan uji konsekuensi	Sesuai waktu yang dibutuhkan dengan catatan bisa berubah jika : Persetujuan tertulis dari pihak terkait,
208	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar	Data Pribadi Pelamar Umum Pegawai	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf H Selama Proses rekrutmen pegawai	Mengungkapkan data pribadi pelamar yang bersifat rahasia	Menjaga Privasi melindungi dari penyalahgunaan data informasi yang bersangkutan	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan
209	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Biodata Pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf H Tahun 2008	Mengungkap data pribadi PNS/Non PNS yang bersifat rahasia	Menjaga Privasi melindungi dari penyalahgunaan data	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
	Desa Kota Denpasar		Apabila Mendapat persetujuan yang bersangkutan		informasi yang bersangkutan	
210	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar	Kode Akses Username dan Password Aplikasi, Internet /Wifi Termasuk password website dan Password email	UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE Selama Kode Masih Digunakan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga Keamanan data yang bersifat rahasia	Selama masih digunakan
211	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar	Dokumen / berkas kepegawaian PNS	UU No/2008 pasal 17 huruf h selama yang bersangkutan menjadi PNS	Mengungkap data pribadi PNS/Non PNS yang bersifat rahasia	Menjaga Privasi melindungi dari penyalahgunaan data informasi yang bersangkutan	Selama yang bersangkutan menjadi PNS
212	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP sampai audit selesai	Belum terjaminnya kebenaran informasi	Data yang belum diaudit oleh auditor atau BPK tidak boleh disebarkan karena belum terjamin keakuratannya	Sampai audit selesai
213	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar	Rekening Bank pribadi pegawai kontrak / Non PNS	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE pasal 1 angkat 6	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan rekening bank	Selama rekening masiih digunakan

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			UU No 10 Tahun 1998 pasal 40 ayat 1 selama rekening masih digunakan			
214	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Denpasar	Sistem Manajemen Database: Informasi atau dokumen terkait hak akses aplikasi dan server	Pasal 17 huruf c angka 6 UU No 14 Th 2008 Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia data yang dikelola pada aplikasi tersebut	Dapat mengungkapkan data rahasia pada aplikasi tersebut	Menjaga rahasia data pada aplikasi tersebut	Selama jangka waktu yang dibutuhkan
		Bandwidth Management termasuk informasi dan lokasi NOC dan konfigurasi jaringan	Pasal 17 huruf b dan j UU No 14 Th 2008 UU 11 tahun 2008	Dapat menyebabkan serangan terhadap pengelolaan jaringan	Menjaga pengelolaan jaringan	Selama jangka waktu yang dibutuhkan
215	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Denpasar	Data pribadi kepegawaian (termasuk daftar keluarga, cuti sakit, gaji dan pendapatan termasuk aset dan rekening bank, data pendidikan formal dan informal, serta hasil penilaian kompetensi pegawai	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No 14 Th 2008 Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu: keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang yaitu keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang yaitu keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
216	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Denpasar	Informasi pada Dokumen Rancangan Kegiatan Anggaran yang belum disahkan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Dapat menghambat proses penyusunan ataupun pelaksanaan Kegiatan yang masih dalam proses pembahasan	Dapat memperlancar proses penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran	Selama jangka waktu yang dibutuhkan dalam pengesahan dokumen
217	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Denpasar	Data Pribadi Pelapor pada (SP4N Lapor, PRO Denpasar dan PPID) dan Data Pengaduan yang bersifat tertutup (rahasia) pengajuan dari pengadu	a. Pasal 17 huruf h UU No 14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 26 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan
218	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Denpasar	Berita sandi, Spesifikasi sarana komunikasi sandi, Perangkat khusus persandian dan Kunci sistem sandi serta peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama berita masih bersifat rahasia
219	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Denpasar	Data pribadi responden survei/penelitian	UU No. 14 Th 2008 huruf j dan ketentuan lainya dalam UU Perlindungan Data Pribadi	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
220	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Denpasar	Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2025 tentang Manajemen Keamanan Informasi	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
221	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Denpasar	Informasi pada dokumen Form DK (Data Keluarga) pegawai	Pasal 17 huruf h angka 1 UU No 14 Th 2008 Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: riwayat dan kondisi anggota keluarga	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang yaitu riwayat dan kondisi anggota keluarga	Menjaga rahasia pribadi seseorang yaitu riwayat, riwayat dan kondisi anggota keluarga	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi
		Informasi atau dokumen cuti sakit pegawai	Pasal 17 huruf h angka 2 UU No 14 Th 2008 Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang yaitu riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang yaitu riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi
		Informasi atau dokumen pribadi pegawai yang terkait dengan keuangan,	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No 14 Th 2008 Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang yaitu keuangan, aset,	Menjaga rahasia pribadi seseorang yaitu keuangan, aset,	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
		aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang	Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang	pendapatan, dan rekening bank seseorang	pendapatan, dan rekening bank seseorang	
		Informasi atau dokumen terkait hasil penilaian kompetensi pegawai	Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Th 2008 Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: hasil-hasil evaluasi apabilitas, sehubungan intelektualitas, dengan dan rekomendasi kemampuan seseorang	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang yaitu hasil-hasil evaluasi apabilitas, sehubungan intelektualitas, dengan dan rekomendasi kemampuan seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang yaitu hasil-hasil evaluasi apabilitas, sehubungan intelektualitas, dengan dan rekomendasi kemampuan seseorang	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi
		Informasi atau dokumen terkait pendidikan formal atau pendidikan non formal pegawai	Pasal 17 huruf h angka 5 UU No 14 Th 2008 Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang yaitu catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	Menjaga rahasia pribadi seseorang yaitu catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
		Informasi pada Dokumen Rancangan Kegiatan Anggaran yang belum disahkan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Dapat menghambat proses penyusunan ataupun pelaksanaan Kegiatan yang masih dalam proses pembahasan	Dapat memperlancar proses penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran	Selama jangka waktu yang dibutuhkan dalam pengesahan dokumen
222	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Denpasar	Data Pribadi Pelapor pada Akun Sosial Media joyfull.denpasar	a. Pasal 17 huruf h UU No 14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 26 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan
		Data Pengaduan yang bersifat tertutup (rahasia) pengajuan dari pengadu	a. Pasal 17 huruf h UU No 14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 26 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan
223	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Denpasar	Data Pribadi responden survei SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	UU No. 14 Th 2008 huruf j dan ketentuan lainya dalam UU Perlindungan Data Pribadi	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
224	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Denpasar	Data Pribadi Pegawai	a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf H b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik Pasal 26 c. UU No 24 Th 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang
225	Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar	Akses (username dan password) Aplikasi G-Sinjab	UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Selama Password/kode berlaku
226	Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar	Data pribadi kepegawaian	UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Selama Password/kode berlaku
227	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Denpasar	Biodata Pegawai (Alamat Rumah, Nomor Telepon/HP, Nomor Rekening Pribadi, Hutang,Riwayat Keluarga dan	Pasal 17 UU huruf h angka 3 No 14 Tahun 2008 informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia yaitu keuangan, aset,	Dapat mengungkap rahasia pribadi dan penyalahgunaan data	Menjaga rahasia pribadi seseorang dan mengamankan agar tidak terjadi penyalahgunaan data	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
		Dokumen pribadi lainnya)	pendapatan dan rekening bank seseorang			
228	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Denpasar	Daftar akun, password dan data inputan aplikasi/sistem yang digunakan oleh ASN (memuat email , LHKPN, pajak,sistem kepegawaian dan sistem aplikasi lainnya)	Pasal 17 UU huruf h angka 3 No. 14 Tahun 2008 informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia yaitu keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang.	Dapat mengungkap Daftar akun, password dan data inputan aplikasi/sistem yang digunakan oleh ASN (memuat email, LHKPN, pajak, sistem kepegawaian dan sistem aplikasi lainnya)	Menjaga rahasia daftar akun dan data inputan yang digunakan ASN	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi
229	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar	Kode Akses (username daan password) Aplikasi, Internet/WIFI, termasuk password website dan password email	UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Selama Password/kode berlaku
230	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar	SPJ, SPM, SPP, SP2D	a. UU No. 8/1974 tentang Keuangan Negara b. UU 2004 Tentang Perbendaharan negara	Mengungkap data ketidakwajaran	Menjaga Kerahasiaan Pembelanjaan	Masa pelaksanaan pekerjaan
231	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Data Pribadi Kepegawaian	UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Selama Password/kode berlaku

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
	Setda Kota Denpasar					
232	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar	LHP Laporan Hasil Pemeriksaan yang bersifat rahasia	Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	Kurangnya transparansi dan akuntabilitas, Penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, Keterlambatan dalam penanganan masalah	Melindungi kepentingan Negara, menjagakerahasiaan proses penegakan hukum, melindungi hak-hak individu	(-)
233	Kepala Bagian Kerjasama Setda Kota Denpasar	Informasi atau dokumen Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, Nota Kesepakatan, Rencana Kerja, MoU/MSP dan Rencana Kerja Tahunan.	a. Pasal 17 huruf f angka 2 UU No 14 Th 2008 Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik,dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri yaitu korespodensi diplomatik antarnegara b. Pasal 17 huruf b UU No 14 Th 2008 Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan	Dapat mengungkap judul kerja sama dan mitra yang diajak bekerja sama	Menjaga rahasia terkait ruang lingkup, hak dan kewajiban serta tugas tanggung jawab para pihak	Selama jangka waktu yang dibutuhkan serta didasarkan atas kesepakatan para pihak

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat			
234	Kepala Bagian Hukum Kota Denpasar	Laporan Hasil Rapat Penanganan Permasalahan Hukum	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 ayat huruf i	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur dan mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan	Pengambilan keputusan/kebijakan menjadi lebih kondusif dan terarah	Apabila dijadikan alat bukti dipersidangan
235	Kepala Bagian Hukum Kota Denpasar	Data Informasi dan atau dokumen pribadi yang berkaitan dengan permasalahan hukum	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 ayat huruf h	Dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu	Rahasia pribadi seseorang khususnya hak milik seseorang dapat terjaga kerahasiannya	Ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan, untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang
236	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Denpasar	Telaahan staf yang menjadi dasar pertimbangan pengambilan keputusan pimpinan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 ayat huruf a	Menghambat proses pengambilan keputusan, mengganggu stabilitas publik, serta melanggar prinsip rahasia jabatan	Menjamin keputusan yang diterima publik adalah hasil akhir yang sah dan valid	Sampai keputusan ditetapkan
237	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	Draft keputusan kepala daerah atau SK target Capaian	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 ayat huruf a	Menghambat proses pengambilan	Mendukung proses penyusunan kebijakan yang independen,	Sampai ditandatangani dan disahkan

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
	Setda Kota Denpasar	Standar Pelayanan Minimal sebelum ditandatangani		keputusan yang sedang berlangsung	profesional, dan tidak terganggu opini publik sebelum waktunya	
238	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Denpasar	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paket pekerjaan pada saat proses pemilihan penyedia barang/jasa	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b. b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Pasal 7 Ayat (1) huruf b dan Pasal 26 ayat (3)	1. Berpotensi digunakan oleh peserta untuk menyusun penawaran mendekati HPS. 2. Mengganggu persaingan sehat. 3. Menyebabkan penggelembungan (mark-up) harga dan potensi kerugian negara.	1. Menjaga objektivitas dan integritas proses penawaran. 2. Mencegah kolusi atau kesepakatan harga tidak wajar antar peserta. 3. Menjamin tercapainya efisiensi belanja negara.	Sampai dengan waktu pengumuman pemenang pemilihan penyedia
239	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Denpasar	Proses evaluasi Dokumen Penawaran oleh Pokja Pemilihan.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b. b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Pasal 7 Ayat (1) huruf b.	1. Dapat mengundang intervensi pihak eksternal. 2. Membuka potensi lobi atau tekanan kepada Pokja Pemilihan. 3. Mengganggu independensi dan netralitas penilaian oleh Pokja Pemilihan.	1. Memberi ruang objektif bagi Pokja Pemilihan dalam bekerja. 2. Menjaga integritas dan kerahasiaan proses evaluasi sampai pengumuman resmi. 3. Menghindari konflik kepentingan.	Sampai dengan penetapan dan pengumuman pemenang

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
240	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Denpasar	Informasi yang berhubungan dengan penelitian, evaluasi, klarifikasi, konfirmasi, dan usulan calon pemenang tidak boleh diberitahukan kepada peserta, atau orang lain yang tidak berkepentingan sampai keputusan pemenang diumumkan oleh Pokja Pemilihan.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b. b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Pasal 7 Ayat (1) huruf b.	1. Menimbulkan spekulasi, ketidakpercayaan, atau protes dini dari peserta. 2. Memunculkan upaya mempengaruhi hasil pemilihan. 3.Mengganggu tatanan prosedural.	1. Menjamin proses pemilihan berjalan tertib. 2. Menghindari pengaruh eksternal hingga keputusan resmi ditetapkan. 3. Menjaga kerahasiaan strategi evaluasi.	Sampai dengan diumumkannya pemenang secara resmi.
241	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Denpasar	Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) oleh Pokja Pemilihan bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b. b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden	1. Informasi dalam BAHP sebelum pengumuman pemenang bersifat belum final, bisa berubah. 2. Membingungkan publik jika terjadi perubahan pemenang sebelum diumumkan resmi.	1. Memberikan kepastian hukum bahwa informasi pemenang dalam BAHP diumumkan hanya setelah sah dan final. 2. Menjaga kepercayaan terhadap prosedur resmi. 3. Menghindari gangguan terhadap hasil yang belum ditetapkan.	Sampai dengan pengumuman pemenang secara resmi

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			Nomor 46 Tahun 2025 Pasal 7 Ayat (1) huruf b	3. Meningkatkan potensi sengketa.		
242	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Denpasar	Informasi atau data pada dokumen Form DK (Data Keluarga) pegawai, dokumen cuti sakit pegawai, dokumen pribadi pegawai yang terkait dengan keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang, serta informasi atau data pendidikan formal atau pendidikan non formal pegawai.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1, 2, 3, dan 5.	1. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang. 2.Risiko penyalahgunaan data pribadi	Menjaga rahasia pribadi seseorang.	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi
243	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Denpasar	Data pengguna dan kata sandi untuk akses masuk ke sebuah aplikasi/program berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6.	1.Dapat mengungkap data rahasia pada aplikasi/program berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. 2.Risiko kebocoran data, akses tidak sah, manipulasi data, dan gangguan layanan	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi.

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
244	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Denpasar	Data Penyedia pada LPSE yang hanya ditampilkan melalui akses log in pengguna.	a.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b. b.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 23	Dapat menimbulkan praktek dan persaingan usaha tidak sehat.	a.Mencegah terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. b.Melindungi informasi sensitif penyedia	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/ lembaga penegak hukum.
245	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Denpasar	Data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan.	a.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i. b.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1)	Dapat mengganggu proses penyusunan dokumen/menghambat kesuksesan kebijakan	Menjaga kerahasiaan dokumen.	Tidak terbatas.
246	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Denpasar	Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya.	a.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i. b.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1)	Dapat mengganggu proses penyusunan dokumen/menghambat kesuksesan kebijakan.	Menjaga kerahasiaan dokumen.	Tidak terbatas.

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
247	Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar	Data Pengguna Layanan	-Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional No 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun -Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) -Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)	Mengungkap Data Pribadi	Melindungi data yang bersifat pribadi yang bersifat rahasia	Setelah Proses Audit
248	Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar	Data Kependudukan	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan	Mengungkap Data Pribadi	Melindungi data yang bersifat pribadi yang bersifat rahasia	Setelah Proses Audit
249	Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar	Data Kepegawaian	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP	Mengungkap Data Pribadi	Melindungi data yang bersifat pribadi yang bersifat rahasia	Setelah Proses Audit
250	Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar	User ID dan Password Aplikasi	-Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	-Mengungkap Data Pribadi -Dapat mengungkap data rahasia pada aplikasi	-Melindungi data yang bersifat pribadi yang bersifat rahasia -Menjaga rahasia data pada aplikasi tersebut	Setelah Proses Audit

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			-Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf c angka 6 informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia data yang dikelola pada aplikasi tersebut			
251	Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar	Data Administrasi Keuangan RKA	-Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik -Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	Dapat menimbulkan Penyalahgunaan Dokumen dan Manipulasi data Keuangan	Menjamin Akuntabilitas dan Keamanan Dokumen Keuangan	Setelah Proses Audit
252	Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar	Data Pribadi -Pegawai, -Penerima Layanan, -Pengadu pada Pengaduan Masyarakat, -Kepala Dusun/Kepala Lingkungan, -Lurah dan Perbekel,	a. UU No 14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf H b. UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Dibuka apabila: Pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
		-Bendesa Adat, dan -Pengurus Organisasi Tingkat Kecamatan				
253	Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar	Dokumen transaksi kas di rekening kas daerah dan Dokumen Pendukung Laporan Keuangan (SPJ Fungsional)	-UU No 8 Tahun 1974 tentang Keuangan Negara -UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Apabila dibuka berpeluang menjadi penyalahgunaan	Membantu badan publik mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Dibuka apabila: Terdapat permintaan tertulis dari instansi lain yang telah disetujui dan ditandatangani oleh pejabat berwenang serta telah dilakukan audit
254	Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar	Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Kecamatan Denpasar Utara	a. UU No 14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Bisa terjadi kesalahpahaman karena Perencanaan Pemerintah Daerah masih dalam proses	Melindungi proses rencana kerja pemerintah daerah yang belum ditetapkan dengan Perwali dan APBD yang ditetapkan dengan Perda	Dibuka apabila: Telah dilakukan audit dan sudah menjadi Dokumen Kerja Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Perwali dan berproses lagi menjadi RAPBD yang selanjutnya menjadi APBD yang ditetapkan dengan Perda
255	Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar	Username dan Password Pengguna Aplikasi	-UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Keamanan sistem	Dibuka apabila: apabila dibutuhkan oleh aparat penegak hukum
256	Kecamatan Denpasar	Arsip Berkas Surat Pernyataan Silsilah dan Surat	Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Tidak memberi manfaat langsung bagi publik secara luas	1. Privasi dan hak atas data pribadi pihak terkait tetap dilindungi	10 Tahun

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
	Selatan Kota Denpasar	Pernyataan Waris beserta bukti dukungnya	Pasal 17 huruf h angka 1 dan 2: Badan Publik dikecualikan memberikan informasi publik yang apabila dibuka dan berikan kepada pemohon informasi publik dapat: 1. Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir wasiat seseorang 2. Mengungkap rahasia pribadi seseorang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan Data Pribadi -Pasal 2 ayat (1): Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan pemrosesan data pribadi, baik dalam bentuk elektronik maupun non-elektronik. -Pasal 58 huruf a: Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengakses data pribadi milik orang lain.	karena informasi ini bersifat individual dan spesifik 2. Tidak relevan secara langsung dengan fungsi transparansi publik 3. Berpotensi melanggar UU KIP dan UU PDP karena membocorkan data pribadi yang dilindungi	2. Mengurangi resiko penyalahgunaan informasi pribadi atau hukum 3. Tidak mengganggu kepentingan publik karena menyangkut kepentingan privat	

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
257	Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar	Dokumen Pertahanan 1. Akte Jual Beli 2. Buku B Rincikan 3. Letter C 4. Warkah Tanah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h: Badan publik dapat tidak memberikan informasi yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, termasuk di dalamnya informasi tentang: a. Lokasi, jumlah, jenis dan nilai kekayaan alam b. dokumen yang berpotensi disalahgunakan untuk mengklaim hak atas tanah atau sumber daya alam Huruf g: Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan penyangkut hak privat seseorang (seperti akte jual beli tanah), dikecualikan. Perki Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan	1. Mengungkap Data Pribadi Kepemilikan tanah yang bersikap rahasia 2. Mengindikasi spekulen dan mafia tanah, pemalsuan dokumen pertanahan	1. Melindungi kerahasiaan dokumen pemilik tanah 2. Menjaga kerahasiaan tanah 3. Mencegah spekulen dan mafia tanah	Permanen

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			Informasi Publik Pasal 19: Badan publik wajib melakukan uji konsekuensi atas informasi yang ingin dikecualikan. Peraturan Mentri ATR/BPN No. 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan BPN Pasal 12 ayat (4) huruf i: Buku tanah, surat ukur, warkah, dan dokumen pertanahan dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan. Pasal 13: Dokumen tersebut hanya dapat diberikan kepada instansi pemerintahan (jika dibutuhkan pelaksanaan tugas) atau berdasarkan kasus khusus			
258	Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar	Informasi pada dokumen Form DK (Data Keluarga) pegawai	Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang yaitu riwayat dan kondisi anggota keluarga	Menjaga rahasia pribadi seseorang yaitu riwayat, dan kondisi anggota keluarga	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: riwayat dan kondisi anggota keluarga			
259	Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar	Informasi terkait akses masuk ke sebuah aplikasi	Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia data yang dikelola pada aplikasi tersebut	Dapat mengungkap rahasia data pada aplikasi tersebut	Menjaga rahasia data pada aplikasi tersebut	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi
260	Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar	Data Pribadi Pelapor pada Aplikasi Pengaduan (SP4N Lapo! Dan Pro Denpasar)	a. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 26 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	"Menjaga rahasia pribadi seseorang"	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan
261	Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar	Dokumen kepegawaian	-UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan berpotensi disalahgunakan	Menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi	Selama pegawai yang bersangkutan masih aktif bekerja

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
262	Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar	Identitas penerima layanan	Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 -UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik -UU 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan berpotensi disalahgunakan	Menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi	Dibuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari penerima layanan atau berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan
263	Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar	Data Kependudukan	-UU 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan	Dapat melanggar privasi dan menimbulkan penyalahgunaan identitas	Melindungi data kependudukan masyarakat	Selama berlaku, Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan data kependudukan
264	Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar	Data Administrasi Keuangan (RKA)	-UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses pengambilan kebijakan dan menimbulkan kesalahpahaman publik	Menjamin objektivitas penyusunan kebijakan anggaran	Selama jangka waktu yang dibutuhkan dalam pengesahan dokumen
265	Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar	Password, kode akses, konfigurasi jaringan, database,	- UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik	Dapat mengancam keamanan system elektronik pemerintah	Menjaga keamanan informasi dan layanan digital	Selama jangka waktu yang dibutuhkan

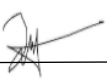
No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
		dan system keamanan informasi pemerintah	- UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			
266	RSUD Wangaya Kota Denpasar	Data Rekam Medis Pasien	a. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Permenkes Nommor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis c. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Dibuka atas persetujuan yang bersangkutan atau atas kepentingan hukum oleh pihak yang berwenang
267	RSUD Wangaya Kota Denpasar	Data pribadi pegawai	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Dibuka atas persetujuan yang bersangkutan atau atas kepentingan hukum oleh pihak yang berwenang
268	RSUD Wangaya Kota Denpasar	Data pengadaan barang dan jasa	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Harga perkiraan sendiri (HPS) dan dokumen penawaran kontrak saat proses berlangsung apabila diungkap dapat mengganggu keamanan proses pengadaan	Menjaga keamanan, objetivitas, dan efisiensi proses pengadaan serta pengelolaan aset	Selama proses pengadaan barang jasa
269	RSUD Wangaya Kota Denpasar	Data pengelolaan data elekktronik	UU Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016	Lokasi server, database manajemen sistem, mekanisme keamanan	Menjaga keamanan perangkat dan data	Tidak Terbatas

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			tentang informasi dan Transaksi Elektronik/IT	data, dan teknologi informasi apabila diungkap dapat mengganggu keamanan		
270	RSUD Wangaya Kota Denpasar	Data dokumen keuangan tertentu	Permenkes No. 37 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Laporan keuangan yang belum diaudit, dokumen SPJ dan SP2D, SPM, SPP sebelum diaudit, apabila diungkap merugikan karena diungkap secara prematur	Mencegah mispersepsi dan misinterpretasi oleh karena pengungkapan secara prematur	Tidak Terbatas
271	RSUD Wangaya Kota Denpasar	Data hutang pasien	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Identitas dan detail hutang pasien kepada rumah sakit apabila diungkap akan mengganggu privasi pasien dan dapat terjadi penyalahgunaan data pasien	Menjaga privasi pasien dan mencegah penyalahgunaan data pasien yang merugikan pasien dan rumah sakit	Tidak Terbatas
272	RSUD Wangaya Kota Denpasar	Naskah kerjasama	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik	Muncul persaingan usaha/kepentingan yang tidak sehat	Melindungi RS dari persaingan usaha/kepentingan yang tidak sehat	Tidak Terbatas

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
273	Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar	Laporan Detail Keuangan Sebelum Audit	a. UU No. 14 Th 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 b. PP No. 61 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 14 dan Pasal 15	Apabila dibuka terjadi informasi data yang belum akurat / belum diperiksa.	Apabila ditutup membantu Perumda memberikan informasi yang akurat dan benar	Dibuka apabila setelah diperiksa oleh autor
274	Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar	Laporan Gaji / Penghasilan pegawai tanpa persetujuan yang bersangkutan	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. PP No. 61 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 14 dan Pasal 15.	Apabila dibuka berpeluang terjadi penyalahgunaan	Apabila ditutup membantu Perumda memberikan informasi yang akurat dan benar	Dibuka apabila setelah mendapat ijin oleh yang bersangkutan
275	Perumda Pasar Sewakadarma Kota Denpasar	Laporan Keuangan Yang Belum di Audit	Perda No 13 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma		v	Tak Terbatas

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
276	Perumda Bhukti Praja Sewakadarma Kota Denpasar	Laporan Keuangan Yang Belum di Audit	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan perusahaan	Melindungi pertahanan dan keamanan perusahaan	Sampai ada ketentuan/aturan baru yang membatalkan ketentuan yang berlaku saat ini
277	Perumda Bhukti Praja Sewakadarma Kota Denpasar	Data Pribadi Pegawai (Karyawan-Karyawati) dan Juga Data Pribadi Petugas Jasa Layanan parkir	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat mengancam privasi karyawan	Melindungi privasi karyawan	Sampai ada ketentuan/aturan baru yang membatalkan ketentuan yang berlaku saat ini
278	Perumda Bhukti Praja Sewakadarma Kota Denpasar	Sandi /User Name - Program Siparkit (Sistem Parkir Berbasis IT dan Keuangan Terintegrasi)	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan perusahaan	Melindungi pertahanan dan keamanan perusahaan	Sampai ada ketentuan/aturan baru yang membatalkan ketentuan yang berlaku saat ini

Bahwa Hari Kamis, 09 Juli 2026 telah terlaksana Pengujian Konsekuensi atau Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

Nama	Instansi	Tanda Tangan
Ida Ayu Dewi Citrawati	Dinas pariwisata	
Ari Kusuma Wijaya	Desa Dangin Puri Kelod	
Ni Made Ambarani Sumerta Putri	Kelurahan Kesiman	
Angga pratama	Peguyangan kaja	
Dra. I Gusti Agung Ayu Oka Mayudhiani	Bagian Adbang Setda Kota Denpasar	
I Gede Umbu Bhakti	Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar	
I M. Adi Purbanegara	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar	
Putu Dewi Yumiartini, S.E.	Kelurahan Kesiman	
Luh Nyoman Endi Suari,S.Sos	Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar	
Ni kadek yuli lestari	Badan kesatuan bangsa dan politik kota Denpasar	
ni putu sandyaswari	dinas pariwisata kota denpasar	
Putu Indra Krisnawan, S.E.	Bagian Perekonomian Setda Kota Denpasar	
Ni Made Rai Ani, SE	Kecamatan Denpasar Barat	
Ni Nyoman Seniawati	Kelurahan Sesetan	
I Gede Arya Anggra Diguna	Bagian Perekonomian Setda Kota Denpasar	
berta ardisurya	DLHK	

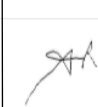
Nama	Instansi	Tanda Tangan
I Ketut Adi Sutrisna	AMSI Bali	
Anak Agung Mas Pradnyandari Mantara, S H	Sekretariat Daerah Kota Denpasar	
I GEDE BUDIARTHA	DESA SUMERTA KAJA	
I Wayan Andi	Dinas Pertanian Kota Denpasar	
PUTU RIKA RUSWIRYANI,SE	PERUMDA AIR MINUM TIRTA SEWAKADARMA	
Putu Sofyan Kusuma	Desa Pemecutan Kaja	
GUSTI AYU MADE SURYANI,SE.MAP	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
I Ketut Purna, S.Sos	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	
Anak Agung Ketut Putriasri, SE	Dinas Pertanian Kota Denpasar	
Ni Wayan Suarni	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	
Ni Made Dewiyanti, S.ST.Par.,M.Par	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	
I Gusti Ayu Tia Dewi Prawita, SKM	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	
Anak Agung Ngurah Ari Dwiatmika, S.H., M.Kn.	BRIDA Kota Denpasa	
I Made Nanda Agustika	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar	
Ni Nengah Samiadi, S.Ag	Kecamatan Denpasar Barat	

Nama	Instansi	Tanda Tangan
Anom Putri Lestari	Dauh Puri Klod	
ni wayan saptiari	pemerintah desa ubung kaja	
I MADE KARTIKA	DESA SANUR KAUH	
Dewa ayu putu ekayanti, SP	Dinas pertanian	
Gusti Ayu Made Putri Yuniswari, S.STP., M.A.P.	Kelurahan Pemecutan	
Ni Wayan Susilawati	Kelurahan Dangin Puri Kecamatan Denpasar Timur	
SRI PUJI ASTUTI, SH	KELURAHAN RENON	
I WAYAN SUTARJA PUTRA, S.H.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA DENPASAR	
Bdn. Anak Agung Ayu Dewi Purnami, SST	RSUD Wangaya	
IDA BAGUS AGUNG UPAWANA MANUABA	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	
I Putu Eka Pertama,S.Sos.,M.AP.	Kecamatan Denpasar Barat	
Anak Agung Gde Agung Aricahya	Baguan Administtasi Pembangunan	
Ida Ayu Agung Nusantara	Kelurahan Sesetan	
Nyoman Sukrani	desa tegal kertha	
NI MADE RAKA KUMARAWATI	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	

Nama	Instansi	Tanda Tangan
Gusti Nyoman Parwati, S.E	Kelurahan Dangin Puri	
Ketut Ary Diana Artha, S.KM., M.Kes	Dinas Kesehatan	
I Gede Putu Krisna Juliharta	Relawan TIK Bali	
I Made Wahyu Artana, S.E.	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	
NI NYOMAN SRIWIRANI WIDOWATI	DINAS KOPERASI UMKM KOTA DENPASAR	
I MADE AGUS SUTEJA, SE, M.Si	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR	
I Made Sarmadi	Desa Kesiman Kertalangu	
Desak Made Ekaprastyawati, S.P.	PERUMDA BHUKTI PRAJA SEWAKADARMA	
Mega Asmara Purwantini, S.STP	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	
I NYOMAN NESA MAS GUNADI	KELURAHAN SESETAN	
I Gede Satya Adhi Wicaksana	Dinas Sosial Kota Denpasar	
Ida Ayu Cininta Padangratha	BKPSDM Kota Denpasar	
Dr. Ir. I Dewa ketut Adi Pradnyana, S.SiT. M.T., IPM.	Dinasa Perhubungan	
I Gede Sukana Dananjaya	DPMPTSP Kota Denpasar	
Ni Luh Made Mustikayanthi, S.E	Bagian tata pemerintahan setda kota denpasar	

Nama	Instansi	Tanda Tangan
A.A. Ngr Indra Kumara Putra	Dinas Pariwisata	
I NYOMAN DASNA ADNYANA	DESA DANGIN PURI KANGIN	
Ni Made Sri Wahyuni, S.Sn.	Kelurahan Sumerta	
I putu Pujawan	Dinas pariwisata kota denpasar	
A.A.A. NGR. SRI UTAMI WIJAYANTI	DESA PEMOGAN	
I Wayan Purwanatha, S.Pd	Desa Pemecutan Kelod	
Ni Putu Ari Widiastuti	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar	
A.A. Gede Alit Wisnu Juliantara, S.S.	Bagian Kerja Sama Setda Kota Denpasar	
Ni Wayan Vijyanthi Sari	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
Renita Intan Cahyani, S.K.Pm	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Denpasar	
Anak Agung Istri Pramitha Swari,S.Kom	Dinas Pemberdayaan Perempuan daan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	
Anak Agung Gede Mahendra	Bappeda Kota Denpasar	
I Gusti Ngurah Aditya Putra	Dishub Denpasar	
Ida Bagus Putu Jayawiguna	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
Desak Eka Nila Prastyawati	Perumda Bhukti Praja Sewakadarma	

Nama	Instansi	Tanda Tangan
Anak Agung Istri Pramitha Swari,S.Kom	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	
Anak Agung Gede Mahendra	Bappeda Kota Denpasar	
I Gusti Ngurah Aditya Putra	Dishub Denpasar	
Ida Bagus Putu Jayawiguna	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
Desak Eka Nila Prastyawati	Perumda Bhukti Praja Sewakadarma	
NI PUTU ANINDITA ADI PURWANI, S.H.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR	
Ni Made Ayu Krisna Dewi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	
Ni Made Dwi Lestari	Desa Sanur Kaja	
Ni Nyoman Uripayani,S.E.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	
Rai Suryathi	Brida	
PUTU RISKAYANA FEBRIANA	DESA SIDAKARYA	
Made Ayu Wahyuni,SE.,M.Si	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	
I Nyoman Veldy Destriandi, A.Md	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Denpasar	
I Gusti Ayu Istri Raka, S.H.	Sekretariat DPRD Kota Denpasar	
I ketut alit wijana	Bagian umum setda	

Nama	Instansi	Tanda Tangan
Ni Made Ayu Agustini, SE.,MM	Dinas Pendidikan,Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
A.A. Trisha Dewi Parasthiwi, S.E	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	
I Gede Wahyu Agustiana Putra, S.Kom	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar	
Luh Putu Ratna Iswari, S.E,Ak	Perumda Pasar Sewakadarma	
Ni Ketut Santyani,S.Sos	Kelurahan Ubung	
Ni Made Dwi Primadani	Kelurahan Tonja	
Ni Nyoman Suwantari	Desa Tegal Harum	
I Nyoman trisna Cahya Nugraha	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	
Ni Ketut yuliani	Kelurahan peguyangan	
I Gede Bagus Bayu Kresnapati, S.E.	Pemerintah Kota Denpasar	
Made Widiatmika,SE.,M.Si.	Sekretariat DPRD Kota Denpasar	
Putu Udy Kustiawati, SE	Inspektorat	
Dewa Nyoman Suardana	Komisi Informasi Provinsi Bali	
I Nyoman Eddy Winantha, S.Sos	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Denpasar	
Ni Wayan Antari	Distan	
Soviaty Nubatonis	Desa Padangsambian Kelod	
I WAYAN SUTEJA	DESA PEGUYANGAN KANGIN	
dewa gede rai	bapenda	
I Gusti Ngurah Arnawa	Kecamatan Denpasar Utara	

Nama	Instansi	Tanda Tangan
I Made Antara,SE	BPBD Kota Denpasar	
Anak Agung Bagus Mahendrayana, S.E	Desa Dauh Puri Kauh	
Putu Dicky Gunawan	Desa Penatih Dangin Puri	
I Made Dwi Suta Atmaja	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Denpasar	
Komang Puspariani, S.E Sang Nyoman Putra Arsa Wijaya	Kelurahan Renon PERUMDA BHUKTI PRAJA SEWAKADARMA	 
Ni Wayan Diani, SE	Kelurahan Dauh Puri	
Ni Nyoman Ayu Permayasari	Bagian Hukum	
I G A G A Widiani Kepakisan	KPID BALI	
I Gusti Ngurah Agung Sumadana	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
I Putu Dede Aridana	Desa Kesiman Petilan	
I Gde Okta Satria Nugraha	Kelurahan Padangsembian	
I Nyoman Ega Beerawa	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	
Ida Ayu Rai Laksmi Dewi, S.T.	DPMPTSP Kota Denpasar	
Kadek Ratna Dewi	Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar	

Nama	Instansi	Tanda Tangan
Gung dewi	Diskominfo	
gung is	diskominfo	

1

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Denpasar,

Gde Wirakusuma Wahyudi, S.Sos
Pembina Tk.I/IV/b
NIP. 197402051999031010

